

**MELEMAHKAN JARINGAN KELOMPOK MUJAHIDIN DI INDONESIA:  
PELAJARAN DARI MALUKU DAN POSO**

Asia Report N°103 – 13 Oktober 2005

## TABLE OF CONTENTS

|   |           |
|---|-----------|
| <b>RANGKUMAN IKHTISAR DAN REKOMENDASI.....</b>                | <b>i</b>  |
| <b>I. PENDAHULUAN .....</b>                                   | <b>1</b>  |
| <b>II. MALUKU, POSO, DAN MAKNA JIHAD LOKAL .....</b>          | <b>2</b>  |
| <b>III. SERANGAN DI SERAM.....</b>                            | <b>4</b>  |
| A.    LATAR BELAKANG PENYERANGAN DI LOKI.....                 | 5         |
| B.    JARINGAN DIGAMBARAKAN MELALUI CERITA ASEP.....          | 8         |
| <b>IV. BOM TENTENA .....</b>                                  | <b>12</b> |
| A.    BOM TENTENA .....                                       | 12        |
| B.    TEORI MENGENAI PARA PELAKU BOM.....                     | 13        |
| 1.    Islam Radikal .....                                     | 13        |
| 2.    Korupsi .....   | 15        |
| C.    PARA TERSANGKA .....                                    | 16        |
| <b>V. KEADILAN, REINTEGRASI DAN JARINGAN-JARINGAN.....</b>    | <b>18</b> |
| A.    KEADILAN DAN KEAMANAN.....                              | 18        |
| 1.    Memperbaiki hubungan antara Polisi dan Masyarakat ..... | 19        |
| 2.    Menghadapi Masa Lalu .....                              | 20        |
| 3.    Memberikan Rasa Aman .....                              | 21        |
| B.    MEMBONGKAR JARINGAN.....                                | 22        |
| <b>VI. KESIMPULAN .....</b>                                   | <b>24</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |
| A.    PETA INDONESIA.....                                     | 26        |
| B.    PETA INDONESIA TIMUR .....                              | 27        |
| C.    PETA MALUKU .....                                       | 28        |
| D.    PETA KABUPATEN POSO .....                               | 29        |
| E.    KEKERASAN DI POSO DAN MALUKU, 2004-2005.....            | 30        |
| F.    ABOUT THE INTERNATIONAL CRISIS GROUP .....              | 33        |
| G.    CRISIS GROUP REPORTS AND BRIEFINGS ON ASIA .....        | 34        |
| H.    CRISIS GROUP BOARD OF TRUSTEES .....                    | 37        |

## MELEMAHKAN JARINGAN KELOMPOK MUJAHIDIN DI INDONESIA:

### PELAJARAN DARI MALUKU DAN POSO

#### RANGKUMAN IKHTISAR DAN REKOMENDASI

Dengan adanya serangan teroris kedua di Bali, kebutuhan untuk memahami jaringan Muslim militan di Indonesia semakin mendesak. Dua buah peristiwa kekerasan pada bulan Mei 2005 – yaitu terbunuhnya beberapa anggota polisi Brimob di Pulau Seram, Maluku dan pengeboman sebuah pasar di daerah Tentena, Poso – memberikan studi kasus mengenai bagaimana jaringan/network tersebut terbentuk dan beroperasi. Melemahkan jaringan tersebut merupakan kunci untuk mencegah kekerasan berlanjut, termasuk terorisme.

Di Maluku dan Poso, dua lokasi dimana konflik antar agama yang paling hebat setelah jaman Soeharto terjadi, salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu dengan mengadakan program yang ditujukan bagi mereka yang pernah bertempur (didaerah konflik) dan para mujahidin yang akan bebas dari penjara. Orang-orang ini seringkali menjadi bagian dari jaringan yang merentang luas hingga melampaui dua daerah konflik tersebut. Namun jika mereka dapat di 'integrasikan kembali' kedalam kehidupan masyarakat biasa, hasrat mereka untuk membantu para mujahidin di tempat lain di Indonesia, atau terlibat dalam kekerasan, mungkin dapat berkurang.

Menyikapi masalah keadilan yang lebih luas serta masalah keamanan, mungkin juga dapat membantu.

Studi atas peristiwa Seram dan Tentena mengindikasikan bahwa daerah konflik tersebut masih menjadi rumah bagi "sisa-sisa mujahidin" yang berangkat ke daerah konflik tersebut dari daerah lain di Indonesia untuk bertempur dan tidak pernah meninggalkan daerah itu lagi; yang sudah kembali ke daerah asal mereka namun masih tetap berhubungan dengan orang-orang yang mereka latih maupun orang-orang yang pernah bertempur bersama mereka didaerah konflik tersebut; atau yang direkrut dari daerah setempat dan terus aktif di kalangan mujahidin meskipun konflik sudah semakin berkurang.

Jaringan militan di Maluku dan Poso tetap kuat karena beberapa hal:

- ❑ Para anggota dari organisasi-organisasi mujahidin besar di Indonesia – yaitu Jemaah Islamiyah (JI), pecahan maupun cabang dari Darul Islam (DI), KOMPAK dan lainnya -- melihat Maluku dan Poso sebagai daerah dimana "musuh Islam", termasuk kaum Kristen didaerah tersebut, terus dianggap sebagai ancaman bagi komunitas Muslim;
- ❑ Mereka percaya bahwa sebagian dari Maluku dan Poso, namun khususnya Poso, memiliki potensi untuk dijadikan *qoidah aminah*, yaitu sebuah daerah terlindung dimana penduduknya dapat hidup berdasarkan prinsip Islam dan menerapkan syariat Islam. Dalam pandangan mereka, basis semacam itu kemudian dapat dijadikan benteng untuk sebuah negara Islam. Karena itu, maka Maluku dan Poso terus menjadi fokus bagi upaya dakwah dan perekrutan anggota baru mereka;
- ❑ Bagi sebagian dari mereka yang pernah bertempur di daerah konflik, baik dari daerah setempat maupun luar, kombinasi dari pelatihan militer serta ikut dalam pertempuran, mungkin merupakan pengalaman yang sangat berarti bagi mereka. Sehingga bisa jadi, sulit bagi mereka untuk kembali ke kehidupan 'sipil' yang biasa-biasa saja, kecuali ada pilihan lain yang lebih baik; dan
- ❑ Adanya konsentrasi para bekas mujahidin di kedua daerah konflik tersebut menarik bagi buronan polisi yang dimasa lalu sudah menemukan network yang siap membantu mereka.

Serangan terhadap pos polisi Brimob di Pulau Seram pada tanggal 16 Mei 2005, secara khusus memperlihatkan bagaimana orang-orang dengan latar belakang yang beraneka ragam dari berbagai network, dapat bersatu dan membentuk sebuah kelompok operatif. Serangan tersebut melibatkan anggota KOMPAK, Darul Islam, sebuah organisasi yang berbasis di Poso, dan kemungkinan juga JI. Namun kelompok penyerang tersebut kelihatannya tidak diorganisir melalui hirarki organisasi apapun. Memiliki pengalaman berlatih dan bertempur bersama-sama di masa-masa awal konflik di

Poso dan Maluku kelihatannya lebih penting, dan menjadi prinsip yang mengatur. Ikatan tersebut juga cukup kuat untuk mengumpulkan dari berbagai daerah anggota tim penyerang yang berasal dari Jawa, Sulawesi, Sumatra dan Maluku.

Peledakan bom di pasar Tentena, yaitu kota yang berpenduduk mayoritas Kristen, lebih misterius. Dalam penyelidikannya, polisi telah menahan lebih dari selusin orang, namun di antara mereka tidak ada yang dijadikan tersangka dan identitas pelaku masih belum jelas.

Hal ini telah menandakan betapa kompleks jaringan yang terlibat dalam aksi kekerasan yang terjadi baru-baru ini di daerah tersebut. Orang-orang yang terlibat dalam kekerasan lain di Poso tidak hanya mereka yang berada di kalangan para mujahidin, namun juga melibatkan pejabat lokal dan pimpinan geng.

Salah satu kebutuhan di daerah konflik ini adalah usaha penegakan hukum yang lebih baik. Masalah penegakan hukum ini telah ada sejak lama dan bukan hanya terjadi saat ini. Namun perbuatan polisi, khususnya salah tangkap dan memperlakukan tahanan dengan buruk, telah menjauhkan polisi dari masyarakat setempat, dan membuat masyarakat enggan untuk membantu penyelidikan polisi. Kegagalan aparat keamanan di masa lalu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terancam, menjadikan orang-orang yang menjadi hakim sendiri diperlakukan sebagai pahlawan. Jaksa, pengacara dan hakim telah menjadi sasaran intimidasi, dan perbuatan yang lebih buruk lagi. Selain itu, pelaku kekerasan sering dijatuhi vonis tak bersalah yang patut dipertanyakan, atau bergabung lagi dengan jaringan mereka setelah menjalani hukuman yang pendek.

Langkah-langkah yang patut diambil antara lain: perlakuan yang lebih baik terhadap tahanan, pengawasan terhadap peredaran senjata api, koordinasi yang lebih baik diantara badan intelijen, dan hukuman yang serius bagi pelaku tindak kejahatan serius.

Kebutuhan yang lain yaitu melibatkan secara langsung veteran lokal dari kekerasan Poso dan Maluku, untuk mengintegrasikan mereka kembali kedalam kehidupan 'sipil'. Salah satu kemungkinan yaitu dengan menghubungkan program reintegrasi dengan program 'asimilasi'. Program asimilasi ini sudah diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, yaitu tahanan yang sebentar lagi akan dibebaskan diijinkan untuk bekerja di luar tahanan pada siang hari, dibawah pengawasan ketat. Hal ini dapat menjadi jalan untuk memperkenalkan jaringan ini kepada lingkungan sosial yang baru, dan pada saat yang sama memberikan mereka alternatif selain kekerasan.

## **REKOMENDASI**

### **Kepada pemerintah Indonesia:**

1. Melakukan sebuah analisa sistematis tentang mengapa polisi dan badan intelijen gagal mendeteksi persiapan yang dilakukan untuk meluncurkan kedua serangan di bulan Mei 2005. Analisa ini dibuat dengan tujuan untuk menghasilkan rekomendasi, yang dapat menjadi masukan dalam penyusunan naskah rancangan undang-undang tentang intelijen dan keamanan, serta sebuah peninjauan strategis terhadap bidang keamanan nasional.
2. Menyusun sebuah program untuk mengurangi jumlah senjata dan bahan peledak di tangan pribadi/swasta di Maluku dan Poso dengan cara:
  - (a) Meningkatkan pengawasan dan audit terhadap senjata dan amunisi yang di produksi di Indonesia, dan juga persediaan yang dikirimkan kepada polisi dan militer;
  - (b) Lebih mengintensifkan usaha pengumpulan informasi dalam rangka menemukan tempat persembunyian senjata di daerah konflik; dan
  - (c) Membentuk program pengumpulan kembali senjata, melalui amnesti atau rencana pembelian kembali.
3. Meningkatkan hubungan polisi-masyarakat, antara lain dengan menjamin bahwa tersangka yang ditangkap di daerah konflik tidak akan diperlakukan secara buruk selama dalam masa tahanan maupun pada saat interogasi. Dan lebih banyak polisi yang diajukan ke pengadilan dan dituntut dengan hukum pidana, bukan hanya dikenai proses disiplin intern.
4. Meningkatkan upaya penegakan hukum di daerah konflik, sebagian dengan cara menjamin bahwa pengamanan yang memadai akan diberikan kepada jaksa, hakim dan pengacara/pembela, untuk memfasilitasi pengadilan yang adil dan transparan. Selain itu juga menjamin bahwa tindak kejahatan yang dilakukan di daerah konflik akan ditangani dan diperlakukan sama seriusnya seperti tindak kejahatan lain di Indonesia.

### **Kepada para donor:**

5. Bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM, untuk menjajaki pilihan-pilihan apa saja yang dapat dilakukan untuk program reintegrasi yang ditujukan bagi anggota jaringan mujahidin yang berada dalam tahanan, yang bertalian dengan program asimilasi lembaga pemasyarakatan Indonesia.

6. Untuk menjajaki kemungkinan memberikan pelatihan kejuruan kepada para bekas anggota geng, yang berhubungan dengan ekonomi dan lapangan kerja setempat, namun tetap menjauhkan mereka dari pekerjaan yang berhubungan dengan keamanan.
7. Untuk menjajaki kemungkinan membentuk program pembangunan masyarakat yang secara khusus akan meliputi anggota jaringan kelompok mujahidin, tetapi juga terbuka bagi mereka yang pernah bertempur (di daerah konflik) dari pihak Muslim maupun Kristen.

**Jakarta/Brussels, 13 Oktober 2005**

## MELEMAHKAN JARINGAN KELOMPOK MUJAHIDIN DI INDONESIA: PELAJARAN DARI MALUKU DAN POSO

### I. PENDAHULUAN

Dua peristiwa kekerasan di Indonesia pada bulan Mei 2005 – yaitu sebuah penembakan dan sebuah pengeboman – memberikan sebuah studi kasus mengenai bagaimana jaringan kelompok militan Muslim dibentuk. Ikatan yang terjalin melalui pengalaman berlatih dan bertempur bersama-sama di daerah konflik, telah membantu melanggengkan kekerasan. Studi ini memperlihatkan bahwa jaringan kelompok mujahidin dapat diperlemah dan tindak kekerasan yang masih berlangsung, termasuk terorisme, dapat dikurangi dengan cara memberi perhatian lebih kepada masalah-masalah paska konflik di daerah yang sebelumnya hancur akibat pertikaian antar agama atau suku.

Daerah yang dimaksud yaitu Maluku, sebuah propinsi yang terletak di bagian tengah kepulauan Maluku, dan Poso, sebuah kabupaten di Sulawesi Tengah.<sup>1</sup> Kedua daerah tersebut menjadi saksi pertikaian hebat antara masyarakat Muslim dan Kristen, yang meletus hanya beberapa lama setelah kejatuhan Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998, dan dianggap sebagai medan perang yang sah bagi gerakan jihad bersenjata, bagi kelompok militan Muslim diseluruh Indonesia – maupun bagi segelintir operatif asing. Perjanjian damai yang di prakarsai oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang waktu itu menjabat sebagai Menko Kesra, pada akhir tahun 2001 dan awal tahun 2002, secara cukup signifikan berhasil menurunkan eskalasi kekerasan, namun masih belum berhasil mencegah pengeboman dan penembakan berlanjut yang sekali-sekali masih terjadi.

Serangan yang terjadi pada bulan Mei 2005 dilatarbelakangi hal itu. Pada tanggal 16 Mei, delapan orang bersenjata yang terdiri dari orang luar daerah serta penduduk setempat, menyerang sebuah pos keamanan di daerah terpencil di pulau Seram, Maluku. Lima anggota polisi Brimob tewas bersama dengan seorang juru masak mereka. Pada tanggal 28 Mei, dua buah bom meledak di tengah keramaian pasar di Tentena, kabupaten Poso, sebuah kota kecil berpenduduk mayoritas Kristen, dan menewaskan 22 orang. Meskipun identitas dari pelaku peledakan bom Tentena belum diketahui, hampir dapat dipastikan bahwa kelompok militan Muslim terlibat, mungkin dengan bekerjasama dengan pihak lain.

Serangan di Pulau Seram dan Tentena memperlihatkan, meskipun sudah ada perjanjian damai, jaringan kelompok mujahidin masih menganggap betapa pentingnya Maluku dan Poso sebagai lokasi dimana pelaku kekerasan kelihatannya relatif kebal hukum, buronan polisi menemukan tempat perlindungan, dan prajurit baru untuk operasi jihad direkrut. Serangan tersebut juga memperlihatkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan, yang berkenaan dengan upaya menangani keluhan masyarakat (yang timbul dari masalah konflik), peningkatan sistem penegakan hukum agar berfungsi lebih efektif, dan upaya mengintegrasikan kembali mantan kombatan kedua belah pihak yang tadinya saling bertikai dalam konflik antar agama. Kembali memberi perhatian kepada Poso dan Maluku paska konflik bukan saja diperlukan, melainkan juga dapat berguna membantu mengatasi terorisme.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Untuk diskusi mengenai fase yang lebih awal mengenai konflik di Maluku dan Poso, lihat Briefing Crisis Group di Asia No32, *Violence Erupts Again in Ambon (Kekerasan Meletus Lagi di Ambon)*, 17 Mei 2004; Laporan Crisis Group di Asia No74, *Indonesia Backgrounder: Jihad in Central Sulawesi (Latar Belakang Indonesia: Jihad di Sulawesi Tengah)*, 3 Februari 2004; Laporan Crisis Group di Asia No31, *Indonesia: The Search for Peace in Maluku (Indonesia: Memburu Kedamaian di Maluku)*, 8 Februari 2002; Briefing Crisis Group di Asia No2, *Indonesia's Maluku Crisis: The Issues (Krisis di Maluku, Indonesia: Pokok Persoalan)*, 19 Juli 2000.

<sup>2</sup> Tak ada seorangpun dari Maluku atau Poso yang direkrut untuk operasi pengeboman di Jakarta pada bulan Agustus 2003 dan September 2004, walaupun salah seorang dari pelaku yang dijatuhi hukuman mati atas perannya dalam kasus bom Kedubes Australia yaitu Iwan alias Rois, pernah ke Ambon sebagai mujahid selama dua minggu pada awal tahun 2002 dan ke Poso dari bulan Juni 2002 hingga Februari 2003. Lihat kesaksian Iwan Dharmawan Mutho alias Rois alias Fajar alias Abdul Fatah alias Dharma alias Yadi alias Muhammad Taufik alias Ridho alias Hendi dalam berkas perkara Hasan alias Agung Cahyono alias Purnomo, Jakarta 10 Januari 2005.

## II. MALUKU, POSO, DAN MAKNA JIHAD LOKAL

Konflik di Poso dan Maluku disebabkan oleh beberapa hal, sebagian besar karena masalah politik dan ekonomi, daripada masalah agama. Namun pada akhirnya masing-masing pihak menyebut diri mereka dan musuh mereka sebagai pihak Muslim dan pihak Kristen.

Peristiwa kerusuhan di Maluku bermula pada bulan Januari 1999, yang diawali dengan perselisihan antara seorang kondektur dan seorang penumpang angkot di Ambon. Perselisihan ini kemudian dengan cepat memicu sebuah serangan ke sebuah perkampungan Muslim, dimana warganya pada saat itu sedang merayakan Idul Fitri. Pertikaian antar agama kemudian pecah di Ambon dan kepulauan sekitarnya, sehingga tersingkap sebuah keretakan sosial yang dalam dan adanya erosi struktur otoritas tradisional yang sebelumnya tidak nampak pada masa kekuasaan politik Suharto selama bertahun-tahun. Akibatnya, ribuan orang tewas, sejumlah besar warga terpaksa mengungsi, dan gelombang para pemuda dari daerah lain di Indonesia mulai masuk ke sana untuk bertempur di pihak Muslim.

Para mujahidin ini, begitu mereka menyebut diri mereka, secara umum terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, yaitu yang dikenal sebagai Laskar Jihad, dipimpin oleh seorang ustadz yang beraliran Salafi dari Yogyakarta yang bernama Jafar Umar Thalib. Mereka menganggap membela kaum Muslim di Ambon adalah wajib. Namun mereka juga menganggap bahwa misi mereka adalah melindungi negara kesatuan Indonesia dari gerakan separatis Kristen. Mereka mengklaim pendukung kelompok pemberontak Republik Maluku Selatan yang memulai bentrok, dan keterlibatan mereka dalam konflik di Maluku menyentil rasa nasionalis beberapa elemen dalam TNI sehingga menaruh simpati dan memberikan dukungan kepada Laskar Jihad pada masa-masa awal konflik.<sup>3</sup> Laskar Jihad mengirim sebuah tim untuk menilai keadaan di Maluku pada bulan Februari 2000, tetapi gelombang pertama pasukan tempur mereka yang jumlahnya ribuan, baru tiba dua bulan kemudian.

Kategori kedua terdiri dari kelompok-kelompok yang jumlahnya lebih kecil, secara umum lebih militan, serta lebih bersungguh-sungguh untuk mendirikan sebuah negara Islam di Indonesia, dan beberapa dari mereka tertarik kepada ideologi jihad salafi-nya Osama bin Laden. Secara keseluruhan dikenal sebagai Laskar Mujahidin,

kelompok mereka dengan jumlah yang cukup banyak pertama kali tiba di Ambon pada bulan Juni 1999. Dalam kelompok ini termasuk Jemaah Islamiyah (JI), dan berbagai cabang dan pecahan dari gerakan Darul Islam (DI). Seperti halnya Laskar Jihad, sebagian besar dari anggota JI (namun tidak terbatas hanya) berasal dari Jawa. Selain itu, ada juga anggota KOMPAK, yaitu sebuah LSM Islam, dan kelompok milisi mereka yang dibentuk kemudian, yang disebut kelompok Mujahidin KOMPAK. Kantor KOMPAK di Solo, Jawa Tengah, memainkan peran utama dalam melakukan perekrutan, pembiayaan dan pelatihan para relawan mujahidin, tetapi kantor yang di Makassar, Sulawesi juga aktif. Kantor KOMPAK di Makassar bekerja sama cukup erat dengan Laskar Jundullah, sebuah organisasi yang berbasis di ibukota Sulawesi Selatan itu.

Laskar Mujahidin memiliki program pelatihan dan keagamaan yang cukup sistematis, termasuk di Mindanao, dimana JI dan DI memiliki kamp pelatihan terpisah. Di Ambon, Laskar Mujahidin lebih cenderung untuk menyerang gereja-gereja dan para pendeta, sementara Laskar Jihad berusaha untuk mengendalikan Ambon sebagai wilayah Muslim. Jika Laskar Jihad menganggap perang di Ambon sebagian besar sebagai perlawanan terhadap pemberontak Kristen, Laskar Mujahidin melihatnya sebagai perang melawan kafir.

Untuk beberapa waktu, Laskar Jihad dan Laskar Mujahidin bekerja sama di Maluku, namun karena adanya masalah pribadi, taktik dan ideologi, akhirnya kerja sama tersebut cepat terhenti. Pada umumnya, network yang berhubungan dengan berbagai komponen dalam Laskar Mujahidin (bukan Laskar Jihad, yang dibubarkan pada bulan Oktober 2002) yang menjadi sumber sebagian besar tindak kekerasan di Maluku dan Poso yang masih terjadi belakangan ini.

Seperti Maluku, konflik yang terjadi di Poso bermula dari sebuah perselisihan yang tampaknya sepele. Sebuah keributan antar pemuda di bulan Desember 1998 kemudian memicu sebuah kerusuhan berskala kecil. Tidak ada korban yang tewas, tetapi masalah yang mendasari ketegangan tidak ditangani. Ketika kerusuhan berlanjut terjadi pada bulan April dan khususnya bulan Mei-Juni 2000, kemudian diketahui sebagai tahap ketiga dari konflik, tingkat kekerasan telah meningkat.<sup>4</sup> Dalam sebuah peristiwa yang paling buruk dalam kerusuhan ketiga ini, pasukan Kristen pada tanggal 28 Mei 2000 membunuh sekelompok Muslim yang berkumpul di sebuah pesantren, dan mengejar mereka yang berusaha

<sup>3</sup> Republik Maluku Selatan diproklamirkan pada tahun 1950, dan sebagian besar (tetapi tidak semua) pendukungnya beragama Kristen. Banyak dari mereka yang lari ke Belanda setelah TNI menaklukkan gerakan tersebut.

<sup>4</sup> Enam orang tewas dalam peristiwa kerusuhan pada bulan April 2000, tiga diantaranya adalah orang Muslim yang ditembak oleh polisi Brimob. Kelurahan Lombogia dihancurkan, dan banyak kaum Kristen yang lari ke arah Selatan, ke Tentena.

lari, selama beberapa hari. Pesantren tersebut bernama Pesantren Walisongo, yang berlokasi di jalan antara kota Poso dan Tentena.

Dalam kejadian itu, kemungkinan sekitar 100 orang terbunuh di dalam pesantren, maupun mereka yang dikejar. Sementara sedikitnya 246 orang, sebagian besar Muslim, tewas dalam kerusuhan fase ketiga yang berlangsung selama dua minggu tersebut.

Pada bulan April 2001, tiga orang telah dihukum mati atas peran mereka dalam tindak kekerasan Mei-Juni 2000. Salah seorang dari mereka, Fabianus Tibo, pada saat pembacaan pledoi menyebut nama enam belas orang Kristen yang menurutnya menjadi otak dari kerusuhan tersebut. Sampai hari ini, kelompok Muslim terus menuntut penahanan dari keenam belas orang tersebut.<sup>5</sup>

Kemarahan atas pembunuhan di Pesantren Walisongo, dan keyakinan bahwa seluruh orang Muslim di daerah tersebut berada dalam keadaan bahaya menyebabkan dikerahkannya kembali para mujahidin. Para veteran tempur konflik Maluku dari JI, DI, Laskar Jundullah dan KOMPAK tiba di Poso beberapa bulan kemudian. Dan KOMPAK sering menjadi organisasi yang memayungi usaha mobilisasi, serta memberikan pelatihan tempur singkat bagi para rekrut baru. Laskar Jihad baru tiba di Poso pada bulan Juli 2001, tak lama setelah sebuah peristiwa yang menewaskan empat belas orang Muslim, sebagian besar perempuan dan anak-anak.<sup>6</sup> Jumlah anggota Laskar Jihad di Poso jauh di bawah jumlah yang diberangkatkan ke Ambon.

Di kedua wilayah konflik tersebut, kerjasama antara para mujahidin dari luar dengan pemuda setempat, membawa akibat yang cukup besar bagi dinamika konflik. Kebanyakan, tetapi tidak semuanya, penduduk setempat yang direkrut adalah para preman yang sudah terbiasa dengan kekerasan dan sangat ingin bergabung dengan kelompok mujahidin. Apalagi ketika lingkungan dan keluarga mereka terkena dampak konflik. Bagi mereka, berjuang untuk Islam awalnya merupakan sebuah jalan untuk bertobat, namun untuk beberapa orang, ketika konflik sudah semakin berkurang, batas antara jihad dan kejahatan menjadi agak samar. Beberapa dari mujahidin yang tadinya preman, ada yang benar-benar meninggalkan jalan lama mereka, tetapi yang lain kemudian kembali ke kehidupan preman, namun tetap berhubungan dengan kelompok mujahidin setempat.

Hingga saat ini, perhatian kepada Maluku dan Poso dalam konteks terorisme di Indonesia telah berfokus pada sejauh mana kelompok mujahidin seperti JI telah mampu memanfaatkan rasa amarah yang timbul dari serangan kepada kaum Muslim, untuk mengembangkan agenda mereka sendiri. Video CD berisi peristiwa kekerasan di Maluku dan Poso yang diperlihatkan pada kelompok-kelompok pengajian, menarik masuknya orang baru. Kebanyakan dari sasaran awal operasi JI, yaitu contohnya pengeboman malam natal tahun 2000, adalah kaum Kristen di Indonesia, untuk membalas kematian kaum Muslim di Maluku dan Poso.,

Tetapi dinamika yang sama pentingnya yaitu sejauh mana para mujahidin dari luar daerah mengadopsi agenda lokal, dan kemudian membantu merencanakan dan melancarkan penyerangan-penyerangan, yang dalam konteks terorisme internasional mungkin tidak masuk akal, tetapi lebih sebagai respon atas rasa sakit hati masyarakat setempat.

Tiga hal lain yang mungkin dapat menjelaskan mengapa “sisa-sisa” mujahidin (yaitu mereka yang bertempur di wilayah konflik yang berasal dari daerah setempat maupun luar, yang kemudian bermukim di sana, dan dalam beberapa kasus menikahi wanita setempat) terus menggalang jaringan bekas mujahidin untuk sekali-sekali melakukan tindak kekerasan, yaitu:

- Anggota dari organisasi-organisasi besar yang berpusat di luar Maluku dan Poso – seperti JI, DI, KOMPAK, dan yang lain – melihat Maluku dan Poso sebagai daerah dimana musuh Islam terus dianggap sebagai ancaman bagi komunitas Muslim. Walaupun sejumlah anggota dari organisasi ini telah meninggalkan, atau tidak mendukung sepenuhnya, rencana untuk menyerang target Barat, beberapa tampaknya menganggap penyerangan terhadap masyarakat sipil di daerah yang banyak menghasilkan anggota pasukan Kristen merupakan hal yang dapat dibenarkan, dan sebagai langkah antisipasi dan pertahanan;
- Pimpinan tertinggi dari organisasi-organisasi ini dilaporkan memiliki keyakinan bahwa sebuah jihad yang sungguh-sungguh baru akan berhasil jika kaum Muslim dapat beroperasi dari sebuah basis terlindung, atau dalam bahasa Arab yang disesuaikan dengan bahasa Indonesia yaitu *qoidah aminah*, dimana penduduknya dapat hidup berdasarkan prinsip Islam dan menerapkan syariat Islam. Dalam pandangan mereka, belum ada tempat semacam itu di Indonesia saat ini, namun mereka berharap untuk dapat mewujudkan hal itu di wilayah Muslim di Maluku dan Poso, khususnya karena sekarang telah terbentuk pemisahan

<sup>5</sup> Sebenarnya, beberapa dari mereka pernah diinterogasi oleh polisi, dan tampaknya tidak semuanya terlibat aksi kekerasan.

<sup>6</sup> Aksi penyerangan tersebut terjadi di dusun Buyung Katedo, dekat desa Kristen, Sepe, pada tanggal 3 Juli 2001.



masyarakat berdasarkan agama akibat pertikaian, sehingga wilayah tersebut memiliki potensi untuk menjadi basis terlindung seperti yang mereka idam-idamkan, melalui pendidikan agama dan dakwah. Keinginan untuk mendirikan sebuah *qoidah aminah* kemudian menjadi sebuah faktor penarik, dan membuat organisasi mujahidin terus berminat pada Maluku dan Poso; dan

- Bagi sebagian diantara para mujahidin, baik dari daerah setempat maupun luar, kombinasi dari pelatihan militer serta ikut dalam pertempuran, mungkin merupakan pengalaman yang sangat berarti bagi mereka. Kecuali ada pilihan lain yang lebih baik, mereka mungkin akan ingin kembali aktif dalam jihad jika ada kesempatan, dari pada meneruskan kehidupan mereka yang biasa-biasa saja seperti berdagang atau bertani.

Oleh karena itu tidak sulit untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan kerja sama antara penduduk setempat dengan orang dari luar terus berlanjut, meskipun konflik telah lama berkurang. Yang lebih menarik adalah bagaimana network tertentu dibentuk. Dalam konteks ini, serangan di Pulau Seram sangat penting untuk di perhatikan.

### III. SERANGAN DI SERAM

Penyelidikan polisi atas peristiwa penyerangan terhadap pos polisi di pulau Seram pada tanggal 16 Mei 2005 segera memperlihatkan identitas mereka yang bertanggung jawab: yaitu sebuah tim ad-hoc (dibentuk khusus) yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang beraneka ragam, dan memiliki hubungan dengan berbagai kelompok mujahidin di Indonesia antara lain KOMPAK, Darul Islam, sebuah organisasi yang berbasis di Poso, dan kemungkinan, dalam satu kasus, JI. Dari delapan penyerang bersenjata, tiga orang diantaranya berasal dari Maluku, satu orang dari Jawa Barat, satu orang dari Riau dan tiga orang lagi dari Poso. Menurut laporan, penyerangan tersebut direncanakan di Ambon, disebuah rumah milik seorang mujahid "left-over" (tersisa) dari Madura bernama Ustadz Arsyad alias Asad, dari KOMPAK, yang datang ke Maluku untuk bertempur dan akhirnya terus tinggal disana.

Hasil interogasi terhadap para tersangka tampaknya mampu menguak misteri tentang siapa yang bertanggung jawab atas serangan-serangan yang banyak terjadi di Ambon selama dua belas bulan terakhir ini, serta memperlihatkan hubungan yang tadinya tidak diketahui antara sekelompok individu dengan latar belakang yang lebih beragam.<sup>7</sup> Beberapa diantaranya saling mengenal melalui sebuah kamp pelatihan di pulau Buru pada bulan Juni 1999; beberapa pernah bertempur bersama di Poso; sebagian lagi pernah berlatih bersama di Mindanao. Beberapa orang masuk ke dalam network penting lewat hubungan perkawinan. Yang lainnya tadinya datang ke Ambon sebagai buronan polisi, termasuk dua orang yang terlibat dalam sebuah kelas untuk belajar membuat bom tetapi terpaksa kabur karena bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bom tersebut (secara tidak disengaja) meledak dan menghancurkan atap sebuah rumah di Cimanggis, Jakarta pada bulan Maret 2004.

Sementara serangan di pulau Seram kemungkinan telah diinspirasi oleh KOMPAK, namun serangan tersebut maupun rangkaian serangan lain sebelum itu tidak menggunakan struktur ataupun hirarki organisasi apapun. Masing-masing operasi tampaknya tergantung pada jaringan pribadi yang satu sama lain berbeda. Masing-masing dari jaringan ini melibatkan beberapa orang yang sama, tapi tidak ada satupun yang persis sama (dengan yang lain).

<sup>7</sup> Sebelum penangkapan ini, kecurigaan polisi terfokus pada kemungkinan terlibatnya satuan TNI, khususnya pasukan Kopassus, berada dibelakang aksi kekerasan. Untuk daftar peristiwa-peristiwa kekerasan, lihat Appendix E.

## A. LATAR BELAKANG PENYERANGAN DI LOKI

Pos Brimob yang diserang oleh sekelompok orang bersenjata di Pulau Seram beberapa waktu yang lalu terletak di desa Loki, kabupaten Seram Bagian Barat. Desa ini merupakan lokasi dimana salah satu tindak kekerasan besar antara pihak Muslim dan Kristen di tahun 1999 terjadi, dan menyebabkan sejumlah besar penduduk terpaksa mengungsi.<sup>8</sup> Pos Brimob tersebut terdiri dari dua buah rumah yang terletak di samping jalan besar. Menurut kronologis kejadian yang disusun oleh polisi, kira-kira jam 3 pagi, empat orang penyerang memasuki kedua buah rumah tersebut, sementara empat orang lainnya berjaga-jaga diluar.<sup>9</sup> Seluruh anggota penyerang membawa senjata dan ratusan amunisi. Di salah satu rumah dimana mereka yang sedang menderita sakit malaria sedang tidur, para penyerang menembak empat anggota polisi Brimob tepat di bagian kepala mereka.<sup>10</sup> Di rumah yang satu lagi, mereka menembak seorang juru masak, bernama Petrus Sarpaly, dan seorang lagi anggota Brimob hingga tewas, serta melukai anggota Brimob lain. Seorang polisi Brimob berhasil menembak tewas seorang penyerang, tetapi kemudian salah seorang penyerang menembak rekannya yang tewas itu di bagian wajahnya, tampaknya supaya identitasnya tidak diketahui. Dua orang anggota penyerang terluka tetapi berhasil kabur. Kapolda Maluku menyatakan anggota Brimob yang

menjadi korban dan juru masak mereka dieksekusi, bukan tewas dalam pertempuran.<sup>11</sup>

Para penyerang kemudian diidentifikasi sebagai Asep alias Dahlan, seorang anggota KOMPAK dari Jawa Barat; Abdullah Umamit, seorang anggota Darul Islam dari Ambon, istrinya adalah ipar Omar al-Faruq, seorang tersangka operatif Al-Qaeda yang kini berada dibawah tahanan Amerika; Ikhlas (satu-satunya penyerang yang tertembak mati) adalah seorang anggota Darul Islam dari Riau, Sumatra; Muchlis, Andi dan Jodi, dipercaya sebagai anggota sebuah organisasi di Poso bernama Mujahidin Kayamanya yang bekerja sama cukup erat dengan KOMPAK; dan dua orang dari Pulau Seram yang hanya diketahui bernama Abu Zar dan Abu Harun.<sup>12</sup>

Polisi meyakini bahwa serangan tersebut telah direncanakan seminggu sebelumnya dalam sebuah pertemuan di sebuah rumah di kawasan Air Kuning, di pinggiran kota Ambon. Rumah tersebut milik Ustadz Arsyad alias Asad, seorang anggota KOMPAK asal Madura, yang pernah mendapat pelatihan di Mindanao, kemudian berangkat ke Ambon untuk bertempur, dan terus tinggal disana setelah konflik mereda.<sup>13</sup>

Kedelapan pelaku penyerangan hadir dalam pertemuan tersebut, serta seseorang bernama Nurdin, seorang anggota Darul Islam yang berasal dari Padang, Sumatra Barat, yang juga telah tinggal lama di

<sup>8</sup> Desa Loki terdiri dari beberapa dusun kecil yang terletak di daerah pesisir dimana hanya dua dusun, yaitu Loki dan Seaputi, yang mayoritas penduduknya adalah Kristen. Pada bulan Agustus 1999, kedua dusun tersebut diserang oleh kumpulan massa Muslim setempat. Pada saat yang sama, kelompok Kristen dari Ariate, di desa sebelah, menyerang Laala, salah satu dusun kecil di Loki yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, dan menyebabkan para penduduk terpaksa mengungsi. Wailisa, dusun kecil lain dekat Loki, menerima pengungsi Muslim dari Piru (sekarang ibukota kabupaten). Ketika kelompok Kristen dari desa Loki berusaha kembali pertama kali pada tahun 2002, mereka diusir pergi. Penduduk dusun Loki kembali pada bulan Februari 2004 setelah sebuah LSM berhasil menengahi kedua belah pihak, dan pemerintah menyediakan dana untuk membangun kembali rumah-rumah. Penduduk Muslim dari dusun lain mengatakan mereka menerima dengan baik kembalinya masyarakat Kristen ke desa tersebut, tetapi pada pertengahan tahun 2005, hanya sedikit keluarga yang kembali ke Seaputi (desa Kristen) ataupun Laala (desa Muslim), walaupun rumah-rumah baru sudah dibangun disana. Wawancara Crisis Group dengan direktur LSM setempat, Ambon, Juni 2005; wawancara Crisis Group dengan penduduk Ketapang, Loki, Seaputi, Tanah Goyang, Juli 2005.

<sup>9</sup> Rekaman video Press conference oleh Kapolda Maluku, Brigadir Jendral Polisi Aditya Warman, 19 Mei 2005.

<sup>10</sup> Lima orang polisi yang tewas adalah Tony Susanto, Hasanudin, Teguh Erianto, Slamet Rianto dan S Damanik. Lihat "Menguntit Jejak Kapal Cepat", *Gatra*, 28 Mei 2005, hal. 28.

<sup>11</sup> Rekaman video pidato oleh Kapolda Maluku, Brigadir Jendral Polisi Aditya Warman, kepada tokoh agama setempat, 13 Juni 2005.

<sup>12</sup> Omar al-Faruq tiba di Indonesia dari Filipina bagian Selatan pada tahun 1998, memberi latihan tempur di Ambon dan Poso, dan ditangkap pada bulan Juni 2002; saat ini ia berada dalam tahanan AS di lokasi yang tidak diketahui. Istri Abdullah Umamit adalah saudara perempuan Mira Augustina, istri al-Faruq. Kedua wanita itu adalah anak dari Haris Fadillah alias Abu Dzar, seorang anggota Darul Islam yang berasal dari Riau yang bertempur bersama dengan, menyediakan senjata kepada, dan kadang-kadang memimpin Laskar Mujahidin di Ambon dan meninggal dalam pertempuran di Siri-Sori, Saparua pada bulan Oktober 2000. Lihat Laporan Crisis Group di Asia N°92, *Recycling Militants in Indonesia: Darul Islam and the Australian Embassy Bombing (Mendaur ulang Militer di Indonesia: Darul Islam dan Aksi Pengeboman Kedubes Australia)*, 22 Februari 2005, hal. 36; Laporan Crisis Group, *Jihad in Central Sulawesi (Jihad di Sulawesi Tengah)*, op. cit., hal. 5-6.

<sup>13</sup> "Sebelum Penyerangan, Tersangka Berapat di Air Kuning", *Siwalima*, 28 Juni 2005, hal. 1, 11. Sejak itu Arsyad alias Asad menjadi target utama polisi di Maluku, yang mengklaim bahwa mereka telah menemukan tujuh kilogram TNI yang disembunyikan di atap rumahnya setelah sebuah kejadian lain yang dicurigai telah diatur olehnya, yaitu: sebuah peledakan bom berkekuatan kecil di pasar Mardika, Ambon pada tanggal 25 Agustus 2005.

Ambon dan menjadi komandan kelompok mujahidin setempat. Asad memerintahkan dua orang asal Seram masing-masing untuk membawa empat senjata api dengan angkutan umum, ke sebuah gunung yang terletak di belakang dusun kecil Olas, dekat Loki, pada tanggal 10 dan 11 Mei. Anggota tim penyerang yang lain kemudian berangkat ke Olas antara tanggal 13 dan 15 Mei untuk mengambil senjata api tersebut dan melancarkan serangan. Asep yang datang terakhir.<sup>14</sup>

Menurut salah seorang pelaku penyerangan, penduduk dusun Loki yang beragama Kristen sebenarnya adalah sasaran yang dituju, karena mereka dianggap sebagai “duri dalam daging” bagi pihak Muslim.<sup>15</sup> Namun pos polisi harus disingkirkan terlebih dahulu. Setelah salah seorang pelaku penyerangan tewas tertembak, beberapa dari mereka terluka, dan senjata mereka macet, rencana tersebut dibatalkan. Kemudian mereka melarikan diri kearah dusun yang bersebelahan yaitu Ketapang. Beberapa orang penduduk yang diwawancarai mengatakan, mereka mendengar para penyerang yang mundur tersebut berteriak kepada para penduduk untuk tetap tinggal dalam rumah dan tidak panik, karena mereka mendapat perintah dari komandan mereka untuk tidak melukai penduduk.<sup>16</sup> Polisi berpendapat bahwa polisi Brimob kemungkinan juga menjadi sasaran kelompok ini karena kehadiran mereka telah mengganggu kegiatan pelatihan jihad di pegunungan di belakang dusun Olas dan daerah sekitarnya.<sup>17</sup>

Kalau kelihatannya aksi penyerangan terencana dengan baik, tidak begitu halnya dengan usaha melarikan diri yang kelihatan amatiran dan sembrono, meskipun

memang lima dari tujuh pelaku penyerangan yang selamat berhasil menghindari penangkapan dan masih buron. Para pelaku penyerangan tidak memiliki kapal speedboat atau kendaraan mereka sendiri untuk meloloskan diri. Sehari sebelum aksi penyerangan, dua orang pergi ke Ketapang untuk menyewa salah satu kapal speedboat penumpang untuk membawa mereka besok pagi-pagi sekali. Ketika serangan mereka kelihatannya akan gagal, para penyerang kabur dari situ, membawa rekan mereka yang terluka. Kapal speedboat yang menunggu mereka kemudian membawa mereka ke pulau Ambon, selama satu jam perjalanan yang penuh guncangan. Sesampainya di Ambon mereka lalu memisahkan diri. Dua pelaku penyerangan menyewa sebuah truk pick-up untuk membawa mereka ke Laha, sebuah desa Muslim di daerah pantai dekat bandara. Dalam perjalanan, mereka meminta supir untuk berhenti sebentar, sementara mereka membuang amunisi dan kain terpal yang dipakai untuk membawa senjata mereka. Empat pelaku penyerangan yang lain naik ke bis umum, kemudian naik kapal speedboat kedalam kota.<sup>18</sup>

Sebuah pengejaran polisi secara besar-besaran segera mulai mendapatkan hasil. Pada hari aksi penyerangan terjadi, polisi berhasil menemukan kapal speedboat yang disewa oleh para pelaku penyerangan, dan menahan awak kapalnya. Pada malam yang sama, polisi menahan Asep alias Dahlan di Kebun Cengkeh, yaitu sebuah perkampungan Muslim di dalam kota Ambon.<sup>19</sup> Ia ditembak di bagian tangan pada saat penyerangan, dan dicurigai sebagai pemimpin kelompok penyerangan ini.<sup>20</sup> Polisi juga menangkap Nurdin, anggota DI, pada waktu yang hampir bersamaan, dan tiga hari kemudian menangkap Abdullah Umamit di pulau Buru.<sup>21</sup>

Pada tanggal 19 Mei, polisi berhasil menemukan sebuah tempat persembunyian senjata yang cukup signifikan – yaitu lebih dari selusin senapan, 23 pucuk pistol, ribuan amunisi, dan beberapa mortir -- di sebuah gedung olahraga milik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang sedang dibangun. Beberapa senjata dan amunisi dipercaya merupakan sisa-sisa senjata yang dirampas oleh pasukan Muslim dari gudang senjata milik Brimob di Tantai, Ambon pada bulan Juni 2000. Tidak jelas sudah berapa lama senjata tersebut berada disana, tetapi STAIN mungkin dipilih sebagai tempat

<sup>14</sup> Ibid. Lihat juga, “Polri: Otak Penyerang Pos Brimob Seram & Tentena dari Solo”, *detik.com*, 31 Mei 2005.

<sup>15</sup> Wawancara Crisis Group, Mei 2005. Sebagian besar pulau Seram, yang sebelum tahun 1999 memiliki banyak desa yang penduduknya merupakan campuran Muslim dan Kristen, berakhir dengan masyarakat yang terpisah-pisah (berdasarkan agama) setelah konflik pecah. Sebelum beberapa keluarga kembali ke Seaputi, penduduk Loki adalah satu-satunya penduduk yang beragama Kristen di desa tersebut.

<sup>16</sup> Wawancara Crisis Group, Juli 2005. Jika benar, hal ini dapat menimbulkan keraguan apakah mereka benar-benar bermaksud menyerang warga sipil. Namun pada saat yang sama, para penduduk mungkin salah mendengar teriakan tersebut atau mungkin para penyerang memerintahkan penduduk untuk tetap tinggal dalam rumah untuk melindungi diri setelah aksi penyerangan gagal. Apapun, jika mereka bermaksud menarget warga sipil, dengan menyerang pos polisi pertama-tama adalah rencana yang buruk. Pos Brimob adalah satu-satunya pos aparat keamanan di daerah tersebut dan terletak di ujung salah satu dusun, dan kemungkinan besar mereka tidak akan mampu mencegah serangan ‘tabrak lari’ terhadap penduduk yang dilakukan oleh delapan orang penyerang bersenjata lengkap.

<sup>17</sup> “Pos Brimob Diserang karena Ganggu Latihan Para Teroris”, *Sinar Harapan*, 14 Juni 2005.

<sup>18</sup> “Lima Pelaku Penyerangan Lokki Ditangkap”, *Ambon Ekspres*, 18 Mei 2005, hal. 1, 11.

<sup>19</sup> Ibid, dan “Pelaku Penyerangan Desa Lokki Ditangkap”, *Ambon Ekspres*, 17 Mei 2005, hal. 1; Awak kapal boat akhirnya dilepaskan kemudian.

<sup>20</sup> Rekaman video Press conference oleh Kapolda Maluku, Brigadir Jendral Polisi Aditya Warman, 19 Mei 2005.

<sup>21</sup> “Di Pulau Buru, Dua Orang Ditangkap Terkait Penembakan Pos Brimob”, *Kompas*, 21 Mei 2005.

persembunyian karena adanya persepsi bahwa Polri dan TNI tidak dapat masuk kampus.<sup>22</sup> Penemuan ini kemudian menyebabkan rektor STAIN, Muhammad Attamimi, kembali diperhatikan. Muhammad Attamimi dikenal sebagai tokoh garis keras yang memiliki hubungan dengan kelompok milisi Muslim yang bertempur di Maluku dan dengan komando daerah militer setempat. Namun sejak diangkat sebagai rektor STAIN pada tahun 2003, sikapnya menjadi lebih moderat.<sup>23</sup> Polisi menginterogasi Muhammad Attamimi sebagai saksi setelah sejumlah senapan ditemukan di STAIN, namun tidak mengambil tindakan lebih dari itu.

Berdasarkan informasi dari hasil penahanan awal, polisi juga telah menangkap beberapa orang yang merupakan bagian dari jaringan yang lebih besar, dimana tak satupun dari mereka terlibat langsung dalam kasus penyerangan di Loki, tetapi mereka terkait dengan tindak kekerasan sebelumnya. Diantara mereka yaitu:

- Ongen Pattimura alias Idi Amin Tabrani, seorang penduduk kawasan Batumerah di Ambon.<sup>24</sup> Ongen yang berasal dari desa Latu, pulau Seram, pernah memimpin sekelompok orang Latu pada masa awal konflik, dan kemudian memimpin sebuah geng di kota dimana anggotanya juga termasuk beberapa orang Latu. Orang-orangnya diyakini pernah menerima latihan tempur dari seorang anggota JI bernama Sueb, namun mereka kemudian berselisih paham pada pertengahan 2004, karena Sueb meminta terlalu banyak dari mereka dari segi agama. Mereka hanya tertarik dengan masalah lokal, bukan global, dan mereka tidak terlalu tertarik untuk mengubah gaya hidup mereka, dimana salah satunya adalah minum minuman keras.<sup>25</sup>
- Fatur, seorang bekas mujahidin dari Makassar, Sulawesi yang datang ke Ambon sebagai anggota Laskar Jundullah, sebuah organisasi yang berbasis di Makassar, dan Wahdah Islamiyah. Ia kemudian

bermukim disana, dan menikahi seorang wanita setempat, dan berjualan bahan bakar untuk hidup sehari-hari. Ia dikenal sebagai seorang ustadz dan seorang penasihat bagi banyak diantara para mujahidin. Polisi percaya bahwa ia telah mengetahui sebelumnya mengenai rencana penyerangan di Loki. Fatur diketahui sangat dekat dengan pasukan siluman, yaitu pasukan yang terdiri dari anggota aparat keamanan yang ikut bertempur dengan rakyat setempat.

- Sueb, anggota JI yang mengadakan kelompok pengajian dimana Ongen Pattimura dan Fatur memperkenalkan penduduk setempat. Sueb berasal dari Jawa Tengah, dan pernah berlatih perang di Mindanao dimana ia menjadi seorang ahli bahan peledak. Ia ditangkap di pulau Buru, tiga minggu setelah penyerangan di Loki. Polisi menuduhnya terlibat secara aktif dalam merencanakan aksi kekerasan yang terjadi hingga Mei 2004, yaitu ketika sebuah bom meledak di depan sebuah gereja di Ambon. Menurut laporan, ia kecewa terhadap Ongen dan pengikutnya, ketika mengetahui motif mereka tidak semurni yang ia harapkan, karena itu ia menitipkan sejumlah senjatanya kepada mereka dan pindah ke pulau Buru.<sup>26</sup> Di sana, ia membuka usaha membeli cengkeh di Maluku dan menjualnya ke Jawa.
- Tomo, seorang rekan Fatur, asli Jawa tetapi telah lama tinggal di Ambon, dan bekerja sebagai teknisi komputer. Rumahnya yang terletak di kawasan Batumerah digunakan sebagai tempat berkumpul bagi sebagian anggota jaringan mujahidin yang ditangkap setelah peristiwa Loki, dan mungkin pula dijadikan tempat menginap sementara bagi sejumlah mujahidin dari luar Maluku ketika datang ke Ambon.
- Harun alias Syaiful alias Fathurrobi alias Nazarudin Mochtar, berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Ia ditangkap di pulau Buru, pada hari yang sama ketika polisi menangkap Abdullah Umamit. Polisi menuduhnya membantu Abdullah kabur. Harun memiliki riwayat panjang dalam kegiatan militan, dan masuk dalam daftar yang paling dicari oleh polisi karena pernah menjadi instruktur dalam sebuah kelas untuk belajar membuat bom di Cimanggis, Jakarta pada bulan Maret 2004. Ia adalah seorang veteran Poso dan pernah bekerja dengan sebuah pecahan kelompok Darul Islam di Sukabumi, Jawa Barat, dimana salah satu

<sup>22</sup> Wawancara Crisis Group, Juli 2005. Ada kesan luas bahwa aparat keamanan tidak dapat menginjakkan kaki mereka kedalam kampus, walaupun kadang-kadang mereka masuk. STAIN kemungkinannya dianggap daerah yang lebih terlarang lagi (bagi aparat keamanan untuk masuk) karena kompleks kampus terletak didalam basis induk pihak Muslim di Ambon, dan kawasan disekitarnya pernah dipakai sebagai tempat latihan tempur selama masa konflik.

<sup>23</sup> Wawancara Crisis Group, Juni, Juli 2005.

<sup>24</sup> Ia pernah kuliah di STAIN, memiliki sebuah café di Batumerah dan dicalonkan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) sebagai anggota DPRD Ambon pada tahun 2004, namun gagal terpilih. Wawancara Crisis Group, Juni, Juli 2005.

<sup>25</sup> Wawancara Crisis Group dengan seorang perwira polisi senior di Maluku, Juli 2005.

<sup>26</sup> Wawancara Crisis Group dengan seorang sumber perwira polisi senior di Maluku, Juli 2004. Lihat juga "Mengaku diajak Ongen dan Fatur", *Info Baru*, 13 Juni 2005, hal 1,11.

anggotanya yaitu Heri Golun, pelaku bom bunuh diri Kedutaan Australia pada bulan September 2004.<sup>27</sup> Ia telah berada di Ambon sejak bulan Juni 2004.

- Cholid, yang juga salah satu tersangka ledakan bahan bom Cimanggis bulan Maret 2004, juga memiliki hubungan dengan Abdullah Umamit, salah seorang pelaku penyerangan di Loki, sama halnya seperti Harun. Ia ditangkap pada pertengahan Juli di Ambon dengan tuduhan bahwa ia yang menyetir kendaraan motor yang dipakai Umamit untuk melemparkan granat ke sebuah kendaraan angkutan umum di kawasan Batumerah pada bulan Maret 2005. Ia melarikan diri ke Ambon bersama Harun pada bulan Juni 2004.<sup>28</sup>
- Hardi Tuasikal, seorang penduduk Ambon, ditangkap pada tanggal 13 Juni di kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ia dituduh terlibat dalam sebuah pelemparan granat di desa Lateri, Ambon pada bulan Maret 2005.

Dengan setiap tangkapan baru, kompleksitas jaringan ini semakin terlihat.

## B. JARINGAN DIGAMBARAKAN MELALUI CERITA ASEP

Kompleksnya jaringan kerjasama di antara orang-orang yang terlibat dalam aksi penyerangan di desa Loki, paling jelas digambarkan dengan melihat riwayat salah seorang pelaku penyerangan yaitu Asep alias Dahlan. Berasal dari etnis Sunda di Jawa Barat, Asep adalah seorang veteran konflik Ambon dan Poso, dan dari pengalamannya selama bertempur ia memiliki hubungan pribadi dengan para anggota dari seluruh organisasi-organisasi besar mujahidin di Indonesia.

Asep lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada masa remaja, Asep tidak terlalu kelihatan tertarik dengan pelajaran agama, tetapi pada usia duapuluh-an ia pindah ke Cipayung, Jakarta, dan tinggal di rumah pamannya

sambil kuliah. Dan disitu ia mulai berubah. Orang-orang yang tinggal di lingkungan dimana ia bermukim sangat beragam dan berseberangan, ada beberapa ustadz terkenal yang memiliki sentimen anti Kristen yang cukup kuat serta memiliki hubungan dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), ada juga beberapa evangelis Protestan yang sama-sama beraliran keras yang memiliki hubungan dengan Doulos, yaitu sebuah organisasi fundamentalis Protestan.<sup>29</sup> Asep mulai mengikuti kelompok pengajian di sebuah masjid dimana seorang pendakwah dari DDII bernama Mujayin Abdul Wahab menjadi imam masjid tersebut. Karena pada saat itu DDII merupakan salah satu organisasi yang menyebarkan informasi cukup detil mengenai peristiwa kekerasan di Ambon, maka pengikut ustadz Mujayin menjadi tertarik dan tergerak untuk melakukan jihad dalam rangka membela sesama Muslim disana.

Sekitar bulan Juni 1999, sesudah mengikuti pendidikan agama (*dauroh*) di masjid tempat ustadz Mujayin menjadi imam, disebarakan sebuah lembar pendaftaran bagi mereka yang tertarik untuk berangkat ke Ambon untuk bertempur. Asep dan seorang teman, Abdullah Sonata, ikut mendaftarkan diri mereka.

Mereka mampir terlebih dahulu di Solo dan bertemu dengan saudara laki-laki ustadz Mujayin yang bernama Arismunandar, seorang anggota JI yang pada saat itu memimpin kantor KOMPAK di Solo yang telah mulai membantu mendanai kegiatan jihad di Ambon. Di Ambon, mereka hanya singgah sebentar, kemudian langsung berangkat ke Waimurat, pulau Buru dimana KOMPAK telah mendirikan sebuah program latihan tempur (*tadrib*).

Yang berada dalam daftar para instruktur dan peserta latihan perang di kamp pulau Buru adalah tokoh-tokoh mujahidin di Indonesia, termasuk:

- Salman alias Apud, yang ditangkap di lepas pantai dekat pulau Sabah pada bulan September 2003, ketika dalam perjalanan pulang dari Mindanao. Saat ini ia berada dalam tahanan di Malaysia;
- Saefuddin alias Faiz, seorang anggota JI dan lulusan Ngruki yang ditangkap di Zamboanga, Mindanao pada bulan Desember 2004. Informasi darinya membuat polisi dapat menangkap Sonata pada bulan Juni 2005;
- Nurudin, saudara kembar Saefuddin, juga anggota JI, belakangan tewas di Ambon;

<sup>27</sup> Untuk gambaran yang lebih lengkap mengenai Harun dan kegiatannya, lihat Laporan Crisis Group, *Recycling Militants in Indonesia (Mendaur ulang Militan di Indonesia)*, op. cit., hal. 28-30.

<sup>28</sup> Wawancara Crisis Group lewat telepon dengan seorang perwira polisi senior di Polda Maluku, Agustus 2005. Untuk gambaran mengenai ledakan bom Cimanggis, lihat Laporan Crisis Group di Asia N°83, *Indonesia Backgrounder: Why Salafism and Terrorism Mostly Don't Mix (Latar Belakang Indonesia: Mengapa Aliran Salafi dan Terorisme Sebagian Besar Tidak Bisa Sejalan)*, 13 September 2004, hal. 27-28.

<sup>29</sup> Sebuah seminari, milik yayasan Doulos diserang oleh ratusan Muslim militan, dan salah satu bangunannya dibakar habis pada bulan Desember 1999.

- Umar dan Ali, dua anggota Darul Islam dari Tasikmalaya, yang direkrut oleh Jabir. Jabir adalah seorang rekan Hambali yang tewas tahun 2000 ketika sebuah bom yang sedang dipersiapkannya untuk operasi pengeboman Malam Natal meledak secara tidak sengaja.<sup>30</sup>

Selain itu ada juga Ustadz Arsyad alias Asad, yang sedang dicari oleh polisi karena keterlibatannya dalam perencanaan aksi penyerangan di Loki. Latihan tempur tersebut berlangsung selama tiga bulan dan didanai oleh KOMPAK dan dikelola oleh JI, namun kerja sama tersebut tidak diteruskan karena adanya perbedaan pendapat dalam masalah pencarian dana. Instrukturnya termasuk Umar Wayan dan Ali Imron, yang telah dihukum dalam kasus Bom Bali, serta Zulkarnaen, ketua operasi militer JI. (Pada saat itu, Zulkarnaen adalah komandan JI untuk seluruh Maluku).

Pada bulan November 1999, Asep meninggalkan pulau Buru dan menuju ke Ambon. Saat itu, sudah ada ratusan mujahidin dari luar Ambon disana, dari Laskar Jundullah hingga Darul Islam. Basis untuk para anggota pasukan Mujahidin dari luar daerah ini didirikan oleh KOMPAK di Kebun Cengkeh – daerah yang sama dimana Asep ditangkap karena kasus penyerangan di Loki pada tahun 2005.

Asep terlibat langsung dalam sebuah peristiwa yang sekarang cukup terkenal, yaitu serangan ke barak polisi Brimob di Tantai, Ambon pada bulan Juni 2000. Para mujahidin dari dalam dan luar Maluku, bekerja sama dengan “pasukan siluman” memimpin serangan, dan berhasil merampas sekitar 800 senjata api.<sup>31</sup> Sejumlah senjata yang ditemukan di STAIN setelah kasus penyerangan di Loki berasal dari serangan ini.

Kecakapan Asep dalam medan tempur di Ambon pada akhirnya membawanya ke Poso. Setelah ratusan orang

Muslim tewas dalam sebuah serangan kekerasan yang sangat besar, dari tanggal 23 Mei hingga awal Juni 2000, pimpinan KOMPAK memutuskan untuk mengirim pasukan. Mereka mengumpulkan enam orang mujahidin yang aktif bertempur di Maluku dalam sebuah tim yang dipimpin oleh Abdullah Sonata, rekan Asep dari Jakarta. Dengan membawa uang tunai sejumlah Rp 17 juta dan empatbelas buah senjata yang didapat dari aksi perampasan ke kamp Brimob, mereka meninggalkan Ambon dan berangkat menuju Poso lewat Makassar.

Tugas utama mereka yaitu untuk membantu mengevakuasi jenazah orang-orang Muslim yang tewas, sambil memetakan kekuatan dan kelemahan musuh.

Asep datang bersama tim kedua yang terdiri dari lima orang untuk menggantikan tim pertama, setelah beberapa bulan.<sup>32</sup> Tugasnya adalah untuk melakukan penilaian yang kedua kali atas kekuatan musuh, dan merekrut mujahidin setempat untuk ikut latihan tempur. Program latihan tempur tersebut dimulai pada bulan Oktober 2000 dan berlangsung selama tiga minggu.

Tim kedua ini dibantu oleh sejumlah anggota Darul Islam, termasuk seseorang yang dikenal sebagai Abdullah alias Jet Li dari Riau.<sup>33</sup> Hampir semuanya veteran Ambon, kecuali Abdullah. Setelah semua siap, pimpinan KOMPAK menarik Asep dari Poso dan mengirimnya kembali ke Maluku.

Pada waktu Asep di Poso, rekan-rekan dalam timnya yang dikirim ke Poso membentuk sebuah kelompok milisi, yang diberi nama Pasukan Jihad (Jihad Forces), yang terdiri dari para mujahidin setempat dan dari luar. Aksinya yang pertama, yaitu sebuah serangan ke desa Sepe pada bulan Desember 2000 tidak berhasil, dan pemimpinnya ditangkap. Abdullah alias Jet Li mengambil alih tongkat komando untuk sementara waktu, namun sebentar kemudian, Asep dipanggil kembali ke Poso dan menggantikan Abdullah. Setelah bebas dari tugas tempur, Abdullah mulai memusatkan perhatiannya untuk memberikan latihan agama kepada para mujahidin setempat di kawasan Kayamanya di kota Poso, dan pada saat yang sama merekrut para pemuda ini untuk Darul Islam. Hasilnya, puluhan anggota baru DI dilantik. Pada tahun 2001, sekitar 100 orang dari para mujahidin setempat ini sepakat untuk membentuk sebuah organisasi baru yang diberi nama Mujahidin Kayamanya, dengan Abdullah alias Jet Li sebagai pemimpinnya.

---

<sup>30</sup> Hambali, bekas ketua Mantiqi I Jemaah Islamiyah (daerahnya meliputi Malaysia dan Singapura) dan salah seorang pimpinan JI yang memiliki hubungan paling dekat dengan al-Qaeda, ditangkap di Thailand pada bulan Agustus 2003, dan saat ini berada dalam tahanan AS di lokasi yang tidak diketahui. Ia adalah salah satu pimpinan JI yang bertanggung jawab dalam perencanaan operasi pengeboman JI pada tahun 2000.

<sup>31</sup> Pasukan Siluman termasuk anggota Brimob dari Sukasari dan Kedunghalang Bogor; Battalion 303 Garut; Battalion 327 dari Majalengka; dan Battalions 611, 732, dan 733, dan juga Benteng Raiders dari Semarang. Dengan mengenakan pakaian sipil, mereka membagikan amunisi dalam jumlah besar kepada pasukan mujahidin, dan berbicara dalam bahasa Sunda, mengundang pasukan mujahidin untuk ikut mengambil langsung persenjataan. Beberapa sumber mengatakan pasukan Kristen juga mendapatkan beberapa senjata dari aksi perampasan, tetapi jelas bahwa aksi perampasan tersebut dipimpin oleh pihak mujahidin.

---

<sup>32</sup> Tim yang kedua dipimpin oleh Farihin Ibnu Ahmad, dengan Ali Fauzi (saudara kandung pelaku Bom Bali, Amrozi dan Mukhlis) sebagai wakilnya.

<sup>33</sup> Abdullah adalah pengikut Gaos Taufik, seorang komandan Darul Islam dari tahun 1950an yang tetap aktif dalam organisasi DI.

Organisasi inilah yang diyakini diikuti oleh Jodi, Andi dan Muchlis (masing-masing dicari terkait dalam serangan di Loki). Sementara Abdullah sendiri terbunuh dalam sebuah serangan ke Tangkura, dekat Poso, pada bulan November 2001.<sup>34</sup>

Setelah beberapa bulan kembali di Poso, Asep memegang sebuah tugas baru. Ia diperintah oleh Arismunandar dari kantor KOMPAK di Solo untuk pergi ke Filipina.<sup>35</sup> Disana, ia akan mengikuti latihan tempur, membeli senjata, dan mengantar para mujahidin dari Indonesia, berangkat dari Sulawesi ke Mindanano atau sebaliknya.

Karena itu, sekitar bulan April – Mei 2001, Asep, beserta tiga orang lainnya, berangkat ke kota General Santos di Mindanao dengan kapal laut. Ketika sampai, ia menemui Usamah, seorang anggota JI yang menikah dengan seorang Filipina. Usamah adalah pemasok senjata bagi JI di Mindanao. Kemudian Asep pergi ke Palimbang, propinsi Sultan Kudarat untuk mengikuti sebuah latihan tempur yang berlangsung selama lima hingga enam bulan di sebuah kamp MILF (Front Pembebasan Islam Moro).<sup>36</sup> Di situ, ia menjadi ahli dalam persenjataan dan sangat dekat dengan Faturrahman al-Ghozi, anggota JI yang berbasis di Mindanao dan dekat dengan Hambali.

Pada saat Asep sedang mengasah ketrampilan tempurnya di Mindanao, para anggota Mujahidin Kayamanya (kelompok yang dibentuk di Poso), juga mengasah ketrampilan mereka – di Maluku. Pada bulan Juni 2001, sejumlah orang dari Poso, yang dipimpin dan didanai

oleh Abdullah alias Jet Li, berangkat ke Ambon.<sup>37</sup> Mereka mengikuti latihan tempur yang dilakukan di kawasan sekitar kampus STAIN di kawasan Batumerah selama sebulan, setelah itu semuanya kembali ke Poso.

Asep menyelesaikan latihan tempurnya di Mindanao sekitar bulan Oktober 2001. Ia kembali ke Indonesia bersama dengan dua orang teman, seorang dari mereka langsung ke Makassar. Yang satu lagi, Bakri, bersama Asep singgah di Tomohon, Sulawesi Utara, dalam perjalanan pulang ke Poso. Pada saat mereka berada di Tomohon, sekelompok milisi Kristen bernama Brigade Manguni melakukan demo anti Osama bin Laden, sebagai buntut dari serangan teror 11 September di AS. Ketua kelompok milisi tersebut bernama Antonius Rolly Roring. Asep dan Bakri merasa sangat tersinggung dengan demonstrasi tersebut, dan karena Antonius bekerja sebagai supir sewaan, mereka menyewanya sebagai supir dan mengatakan kepadanya bahwa mereka ingin pergi ke kota sebelah, tetapi sebenarnya mereka berencana untuk merampoknya, sebagai aksi *fa'i* (merampok non-Muslim untuk keperluan jihad).

Pada tanggal 25 Oktober 2001, Antonius menjemput Asep dan Bakri. Tak lama setelah mereka meninggalkan Tomohon, Asep memintanya untuk berhenti. Ketika kendaraan menepi, Bakri menembak Antonius di bagian kepala, kemudian ia dan Asep meletakkan mayatnya di dalam bagasi mobil. Setelah itu Asep yang menyetir, tetapi sebentar kemudian mobil mereka menabrak kendaraan lain, dan mobil mereka terbalik. Asep dan Bakri tidak mengalami luka-luka yang serius, tetapi karena panik mereka cepat-cepat kabur, tak hanya meninggalkan mayat dalam bagasi mobil, tapi juga sebuah tas berisi sejumlah dokumen dari Akademi Militer Bedis di Mindanao, sekitar 50 buah peluru, dan sebuah paspor atas nama Syamsul Huda milik Asep.

Asep dan Bakri tiba dengan selamat di Poso dimana Asep bergabung kembali dengan rekan-rekan lamanya dari KOMPAK dan Mujahidin Kayamanya, dan mulai bergabung bersama mereka merencanakan serangan ke basis Kristen. Salah seorang pimpinan dari aksi serangan ini yaitu Salman alias Apud, seorang peserta latihan tempur angkatan tahun 1999 di Pulau Buru yang didanai oleh KOMPAK, dan sekarang berada dalam tahanan di

---

<sup>34</sup> Setelah Abdullah tewas, Sofyan Djumpai alias Pian mengambil alih posisi sebagai komandan. Pian ditangkap dalam kasus penembakan jaksa Ferry Silalahi di Palu pada tahun 2004 dan saat ini dipenjarakan dalam kasus kepemilikan senjata api tanpa izin. Ia dibebaskan dari tuduhan kasus pembunuhan pada bulan Maret 2005, tetapi jaksa penuntut umum mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Pian akhirnya digantikan oleh Hence Said di Mujahidin Kayamanya, dan Hence sendiri ditangkap di Jawa pada bulan Juni 2005.

<sup>35</sup> Dalam tugasnya ini, ia menggantikan Suryadi Ma'soed. Keputusan untuk mengirim Asep ke Filipina kelihatannya diambil oleh Arismunandar bersama dengan Agus Dwikarna dari kantor KOMPAK office di Makassar (saat ini berada dalam tahanan di Filipina) dan Syawal Yasin, seorang veteran Afghan dan yang paling senior di kelompok mujahidin di Sulawesi. Lihat Laporan Crisis Group di Asia N°63, *Jemaah Islamiyah in Southeast Asia: Damaged but Still Dangerous (Jemaah Islamiyah di Asia Tenggara: Cedera tetapi Masih Tetap Berbahaya)*, 26 Agustus 2003, hal. 21.

<sup>36</sup> Usamah yang ini salah diidentifikasi dalam laporan Crisis Group sebelumnya sebagai Mustopa, pada saat itu ketua Mantiqi III kelompok JI – yang juga menggunakan nama alias Usamah. Lihat Laporan Crisis Group, *Jemaah Islamiyah in Southeast Asia (Jemaah Islamiyah di Asia Tenggara)*, op. cit, hal. 21.

---

<sup>37</sup> Para peserta latihan tempur di Ambon termasuk: Aco dan Ambo Torik dari Kayamanya; Wiwin Likman dari Moengko; Taufik alias Ufik; Hence Said dari Kayamanya; Emil Salim (saudara kandung Erwin) dari Donggulu; Basri alias Harun dari Moengko; Rafiq, Andreas, dan Farauk Arab semuanya dari Bonesompe. Instruktur latihan tempur antara lain Abdullah dan seseorang bernama Fauzan, yang memiliki logat Malaysia atau Sumatra. Lihat kesaksian Erwin Mardani pada saat interogasi, 21 Agustus 2004, dalam berkas Sofyan Djumpai alias Pian dalam kasus pembunuhan jaksa penuntut umum Ferry Silalahi.

Malaysia. Aksi penyerangan pertama yaitu ke desa Betalemba pada tanggal 27 November 2001. TNI dan Polri gagal meredam serangan pasukan mujahidin yang dilengkapi dengan senjata otomotif. Tiga orang terluka dan lebih dari 70 rumah hancur. Keesokan harinya, pasukan mujahidin menyerang desa Patiwunga, dan membakar sekitar 200 rumah. Kemudian mereka bergerak ke Tangkura, dimana disitu mereka membakar dan menghancurkan sekitar 300 rumah, kantor kepada desa, dan sebuah gereja. Dalam bentrokan dengan pasukan Kristen di Tangkura, Abdullah alias Jet Li terbunuh.

Dalam tiga hari, pasukan gabungan Muslim telah berhasil menguasai lima desa dalam serangkaian “kemenangan” yang membuat mereka merasa yakin bahwa mereka juga akan dapat mencapai Tentena, sebuah kota pasar yang utama di daerah Kristen, dan dari sudut pandang mereka adalah sasaran utama. Tentena merupakan tempat penampungan bagi sekitar 30,000 pengungsi Kristen, dan gereja di Menado maupun gereja Protestan telah memohon pertolongan kepada dunia.

Pemerintah Presiden Megawati kemudian menugaskan Yusuf Kalla untuk memulai pembicaraan damai dalam masalah konflik di Poso.<sup>38</sup> Pembicaraan damai ini pertama kali dilakukan di Malino, Sulawesi Selatan pada bulan Desember 2001. Banyak dari pasukan mujahidin yang berasal dari luar Poso, termasuk JI, dan beberapa anggota KOMPAK, termasuk Arismunandar, yang mendukung pembicaraan damai tersebut, serta kesepakatan damai yang ditetapkan kemudian.<sup>39</sup> Tetapi, Asep dan beberapa orang mujahidin setempat melihat hal itu sebagai usaha menyabotase keberhasilan tempur mereka, tepat pada saat mereka bersiap-siap untuk menyerang Tentena. (Namun sebuah pengerahan aparat keamanan besar-besaran, membuat rencana mereka kecil kemungkinan untuk berhasil, walaupun mereka mencoba.) Mereka juga kecewa karena tuntutan mereka untuk mengadili enambelas orang yang disebut sebagai “otak” tindak kekerasan bulan Mei-Juni 2000 tidak dimasukkan dalam kesepakatan akhir, karena itu mereka memutuskan untuk melanjutkan bertempur, walaupun dalam skala yang lebih kecil.

<sup>38</sup> Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, yang pada saat itu menjabat sebagai Menko Polkam, juga menghadiri pembicaraan damai, serta tahap-tahap negosiasi berikutnya dalam masalah konflik di Maluku.

<sup>39</sup> Dalam sebuah pertemuan terpisah yang diselenggarakan pada tanggal 5 Desember 2001 di Makassar, delegasi Muslim yang dipimpin oleh Agus Dwikarna telah menyusun sebuah pernyataan gabungan yang terdiri dari sembilan point/hal yaitu “Permufakatan Muslim Poso di Malino”. Sebagian besar dari point tersebut berhasil masuk dalam kesepakatan akhir. Lihat Laporan Crisis Group, *Jihad in Central Sulawesi (Jihad di Sulawesi Tengah)*, op. cit, hal. 14-16.

Tak lama setelah perjanjian Malino ditandatangani, Laskar Jihad (yang sebelumnya juga ikut terlibat dalam pertempuran di Poso), membentuk sebuah satgas (satuan tugas) di Poso untuk membersihkan tempat-tempat judi, prostitusi dan tempat-tempat kemaksiatan lain. Tak mau kalah, KOMPAK dan JI membentuk satgas sejenis yang mereka sebut satgas Choirul Ummah (kadang-kadang juga disebut Khairul Umah) pada pertengahan Maret 2002.

Pada bulan Agustus 2002, pasukan Muslim kembali melancarkan serangan besar-besaran di Poso. Yang terbesar, dimana Asep juga ikut terlibat, adalah sebuah operasi gabungan sejumlah kelompok pasukan mujahidin menyerang basis pasukan Kristen di Sepe-Silanca pada tanggal 12 Agustus. Pasukan mujahidin yang berhubungan dengan KOMPAK juga melakukan dakwah dan membentuk sejumlah unit pasukan khusus. Arismunandar, ketua KOMPAK untuk daerah Solo, mengambil alih usaha dakwah dan mulai merekrut da'i dari Jawa untuk dikirim ke setiap pelosok Poso.

Asep kembali ke Jawa sekitar bulan Agustus 2003 dan menikahi seorang lulusan pesantren Al-Islam di Lamongan, yang merupakan salah satu sekolah JI, dimana beberapa pelaku bom Bali mengajar. Ia kembali ke Ambon pada tanggal 23 April 2005 atas perintah KOMPAK untuk mengantisipasi kerusuhan yang mungkin timbul sekitar tanggal 25 April, yaitu hari jadi gerakan Republik Maluku Selatan (RMS). Jika memang sudah ada rencana untuk membuat kekacauan, kelihatannya rencana itu terhalang oleh kehadiran aparat keamanan. Tetapi tak lama setelah itu, ia ikut ambil bagian dalam aksi serangan ke desa Loki.

Kisah kegiatan Asep sejak tahun 1999 mengungkapkan beberapa hal. Ia memperlihatkan pentingnya Ambon dan Poso dalam memotivasi ribuan orang Indonesia untuk berpindah dari hanya teori menjadi praktek dalam melakukan jihad, dan merubah ratusan orang menjadi pasukan tempur semi professional. Ia memperlihatkan betapa mudah bagi orang-orang dari Jawa dan daerah-daerah lain di Indonesia untuk keluar masuk antara kedua wilayah konflik. Dan betapa penting Ambon dalam menghasilkan pemimpin yang ditempa melalui medan tempur seperti Abdullah Jet Li atau Asep sendiri, yang dapat menerapkan keahlian tempur mereka di daerah-daerah baru. Ia memperlihatkan lenturnya batasan organisasi seperti JI, KOMPAK, Mujahidin Kayamanya dan lainnya untuk bergabung, bubar, dan bergabung kembali dalam bentuk aliansi yang lebih besar, satgas kecil, tim penyerang, maupun satgas anti-maksiat.

Akhirnya, cerita Asep memperlihatkan jaringan yang saling bertumpuk satu sama lain, dimana seseorang dapat menggunakan jaringan itu. Jika seseorang meminta Asep untuk membantu merekrut pasukan mujahidin, ia dapat



memilih dari kelompok pengajian Ustadz Mujayin di Jakarta; orang-orang yang ia latih dan sama-sama bertempur di Ambon; jaringan KOMPAK di Solo, Ambon, Makassar, dan Poso; Mujahidin Kayamanya di Poso; jaringan di Mindanao; maupun dari keluarga besarnya maupun istrinya. Dengan menggunakan handphone dan internet, jaringan seseorang dapat menjadi sangat luas.

#### **IV. BOM TENTENA**

Beberapa di antara yang terlibat dalam aksi penyerangan di desa Loki dan dalam cerita Asep, muncul lagi sebagai tersangka dalam kasus pengeboman di pasar Tentena pada tanggal 28 Mei 2005.<sup>40</sup> Tetapi dalam banyak hal, kompleksitas jaringan di Poso hanya menambah misteri mengenai siapa yang bertanggung jawab atas serangan tersebut dan mengapa belum ada seorangpun yang dijadikan tersangka sebagai perencana dan pelaku pengeboman tersebut. Para pejabat di Jakarta percaya bahwa pengeboman ini dilakukan oleh sebuah kelompok Muslim radikal atau tim ad-hoc yang terdiri dari beberapa individu yang masing-masing berasal dari kelompok berbeda. Sementara, banyak orang setempat yang percaya bahwa pengeboman itu dilakukan oleh pejabat setempat (yang mungkin menggunakan bekas mujahid) sebagai usaha untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari sebuah kasus korupsi. Hasil penyelidikan telah memperlihatkan hubungan menarik antara penjahat dan bekas mujahid; ia juga telah memperlihatkan betapa pentingnya untuk mengintegrasikan kembali para bekas mujahidin, serta memiliki sebuah sistem keadilan yang berjalan baik dan berlaku seadil-adilnya di daerah konflik, untuk menghindari kekerasan berlanjut.

##### **A. BOM TENTENA**

Serangan bom di Tentena pada tanggal 28 Mei 2005 melibatkan dua buah bom yang diledakkan limabelas menit berselang. Bom yang pertama meledak di tengah keramaian pasar. Yang kedua meledak di sebelah kantor cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI), di samping pasar. Waktu jeda peledakan berarti bom kedua dimaksudkan untuk membunuh orang-orang yang bergegas membantu korban peledakan bom pertama, atau mereka yang datang hanya untuk melihat apa yang terjadi. Serangan bom tersebut menewaskan 22 orang dan melukai 53 orang, menjadikan serangan tersebut sebagai serangan yang menewaskan paling banyak orang di Indonesia sejak bom Bali pada bulan Oktober 2002.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Terletak 60 kilometer arah selatan dari kota Poso di pinggir danau Poso, Tentena merupakan basis induk pihak Kristen di kabupaten Poso, dimana markas besar Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) berada. Sebelum peristiwa bom bulan Mei, secara umum Tentena terlindung dari aksi kekerasan konflik di Poso karena lokasinya. (Untuk dapat mencapai Tentena dari kota Poso, harus melalui banyak desa Kristen.)

<sup>41</sup> Daftar sebagian korban bom Tentena: Andreas Pontali (bayi berusia dua tahun), Marlin Papaya (pr), Suyati Monunggu (pr), Deni Doelesia (lk), Fattira Pilohima (pr), Rosdian Tojambu (pr), Yoseph Rantelimba (lk), Riman Rajantonda (lk), Marice

Serangan bom tersebut adalah sebuah serangan yang dilancarkan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil, namun diantara yang tewas termasuk seorang pemuda bernama Berni Tungkunan, yang mana ayahnya Paulus Tungkunan, adalah salah seorang dari enambelas yang disebut sebagai "otak" aksi kekerasan bulan Mei 2000, dan dianggap oleh sebagian besar Muslim sebagai salah seorang yang memotori peristiwa kerusuhan yang ketiga.<sup>42</sup> Meskipun tewasnya Berni Tungkunan tampaknya kebetulan, namun waktu peledakan bom, yang bersamaan dengan peringatan tahun kelima atas pembunuhan massal di pesantren Walisongo, sudah hampir pasti bukan kebetulan.

Karena banyaknya jumlah orang yang tewas dalam serangan kedua bom tersebut, membuat usaha penyelidikan polisi diperhatikan dengan seksama oleh masyarakat di Indonesia maupun dunia internasional. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang pada saat kejadian sedang berada di Vietnam, langsung mengutuk serangan bom tersebut, sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan deadline tujuh hari bagi polisi untuk menangkap para pelakunya.<sup>43</sup> Kendati polisi segera melakukan serangkaian penangkapan, dan pada suatu waktu menahan hingga delapan belas orang tersangka, namun Kapolda Sulawesi Tengah Brigadir Jendral Polisi Aryanto Sutadi mengatakan kepada Crisis Group di pertengahan Agustus bahwa saat itu tidak ada "tersangka yang signifikan" dalam tahanan.<sup>44</sup> Empat orang yang awalnya dijadikan tersangka untuk kasus bom Tentena masih tetap dalam tahanan, namun tuduhannya tidak terkait bom Tentena; sementara yang lainnya telah dibebaskan.<sup>45</sup>

## B. TEORI MENGENAI PARA PELAKU BOM

Dua teori yang paling umum yaitu kemungkinan kelompok Muslim radikal atau pejabat setempat yang korup, yang berada dibelakang peristiwa bom Tentena. Meskipun tidak banyak bukti kuat (setidaknya bukti yang bisa diakses oleh umum) untuk mendukung teori tersebut.

---

Tumbuapu (pr), Timparoso Nggau (pr), Enteng Pindonga (lk), Natali Ntoy (pr), Anis (lk), Berni Tungkunan (lk), Alengki (lk), Sukiem (pr), Ari Ru'us (lk), and Rame Momua (lk). *Bom Tentena.....*, Dari POSO-NEWS Mailing List, 29 Mei 2005.

<sup>42</sup> Paulus Tungkunan ditahan sebentar pada bulan Mei 2004 atas kepemilikan senjata api, tetapi tidak pernah disidang. "Berny Tungkunan Korban Ledakan Bom di Tentena", *Radarr Sulteng*, 1 Juni 2005.

<sup>43</sup> "Saya Sangat Marah dan Sedih", *Kompas*, 30 Mei 2005, hal. 1.

<sup>44</sup> Wawancara Crisis Group dengan Kapolda Sulawesi Tengah, Brigadir Jendral Polisi Aryanto Sutadi, 18 Agustus 2005.

<sup>45</sup> "Pengungkapan Bom Tentena, Jauh Panggang dari Api", *Suara Pembaruan*, 17 Juli 2005.

## 1. Islam Radikal

Teori bahwa kelompok Muslim militan yang bertanggung jawab cukup masuk akal, dilihat dari sasarannya, yaitu sebuah pasar yang terletak di dalam kota yang mayoritas penduduknya Kristen di sebuah kabupaten yang telah hancur akibat konflik Kristen-Muslim; waktu kejadian, yaitu pada hari peringatan terjadinya pembunuhan massal di pesantren Walisongo; dan fakta bahwa banyak milisi Muslim setempat yang mengerti cara membuat bom dan sebelumnya sudah pernah menggunakan bom.

Namun sejumlah sumber menjelaskan bahwa bom Tentena jelas bertujuan untuk membunuh, tidak seperti serangan lain yang dilakukan oleh milisi setempat yang kelihatannya lebih bertujuan untuk mendapatkan perhatian atau hanya ingin mengintimidasi tanpa membunuh (kecuali serangan bom di Pasar Poso pada bulan November 2004 yang menewaskan enam orang, dan hingga sekarang kasus ini masih belum dapat dipecahkan.)<sup>46</sup> Seorang aktivis LSM setempat mengatakan kepada Crisis Group bahwa sulit untuk memahami kepentingan apa yang ingin dicapai oleh Muslim radikal setempat jika mengebom pasar Tentena. Situasi di Poso pada waktu itu cukup tenang katanya, dan sejumlah kelompok militan telah memulai hubungan dengan masyarakat Kristen. Namun seperti yang terjadi di Maluku, kelompok setempat maupun dari luar telah bekerja sama, dan kemungkinan sebuah jaringan seperti yang berada dibelakang peristiwa Loki - lah, yang melakukan pengeboman (di pasar Tentena).

Jaringan semacam itu, secara teori mungkin dapat melibatkan anggota dari tiga kelompok lokal, yang mana semuanya pernah terlibat dalam aksi kekerasan paska konflik. Kelompok yang pertama yaitu Mujahidin Kayamanya, dimana salah satu anggotanya ikut terlibat dalam aksi serangan di Loki. Yang kedua yaitu Bulan Sabit Merah (BSM), sebuah front yang dibentuk di Poso pada tahun 2000 oleh cabang dari Darul Islam yang ikut bertanggung jawab dalam pengeboman Kedubes Australia. Anggota BSM juga terlibat dalam peristiwa kekerasan Mamasa, dan pernah ada rumor bahwa mereka berperan dalam serangan bom di Tentena, walaupun tidak ada fakta yang keluar untuk memastikan hal ini. Yang ketiga yaitu Anak Tanah Runtuh (ATR), nama kelompok ini berasal dari nama daerah Tanah Runtuh di Poso, daerah dimana basis mereka berada. Anggotanya mengharapkan bimbingan dari Adnan Arsal, seorang ustadz dan pegawai negeri sipil yang dimasa lalu bekerja sama cukup erat dengan JI; menantunya, Hasanudin, mengepalai wakalah JI setempat di Poso, setidaknya hingga tahun 2003.

---

<sup>46</sup> Wawancara Crisis Group di Jakarta, Palu, Mei-Agustus 2005. Tidak lebih dari seorang yang terbunuh dalam sepuluh peristiwa kekerasan lain yang menimbulkan korban antara bulan Januari 2004 dan September 2005.

Tetapi selama tahun 2005, Arsal telah ikut ambil bagian dalam serangkaian pertemuan dengan tokoh Kristen termasuk pendeta Rinaldy Damanik, yaitu Ketua Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, yang telah menjadi tokoh paling terkemuka bagi masyarakat Kristen di Poso sejak konflik pecah.<sup>47</sup> Damanik dan Arsal adalah anggota dari sebuah perkumpulan lintas agama, Aliansi Kemanusiaan untuk Poso (AKP), dan sehari setelah terjadinya serangan bom, mereka bertemu dan mengutuk kejadian itu.<sup>48</sup>

Tetapi menurut laporan, beberapa anggota ATR secara pribadi, terlibat dalam peristiwa kekerasan yang terjadi pada akhir tahun 2004 dan awal tahun 2005 bersama-sama dengan anggota kelompok lain; minat Adnan Arsal pada dialog antar agama bukan berarti pengikutnya tidak terlibat dalam kegiatan yang lebih berbahaya. Krisno alias Ion, seorang anggota ATR misalnya, adalah salah seorang dari 42 orang yang ditangkap di Mamasa, Sulawesi Barat setelah peristiwa kekerasan di sana pada bulan Oktober 2004.<sup>49</sup>

Salah seorang anggota kelompok Tanah Runtuh yang lain yaitu Andi Ipong, dicurigai terlibat dalam sejumlah tindak kejahatan, tetapi hanya dihukum untuk sebuah tindak

kejahatan.<sup>50</sup> Pada awal tahun 2005, ia menyelesaikan hukuman penjara selama dua setengah tahun untuk kasus perampokan bersenjata.<sup>51</sup> Dan saat ini ia dicari untuk kasus perampokan lain, yaitu pencurian gaji pegawai kabupaten dari kantor bupati Poso pada bulan April 2005, dimana uang sebesar Rp 583 juta hilang dicuri.<sup>52</sup> Ipong tidak terlibat dalam aksi pencurian secara langsung, tetapi ia menerima sebagian dari hasil rampokan, yang mana uang itu ia gunakan untuk membantu membayar pesta pernikahannya.<sup>53</sup> Polisi berusaha untuk menangkapnya (dalam peristiwa yang banyak diliput oleh media massa) di Kasintuwu, Poso Kota pada tanggal 2 Juli 2005, tetapi ia berhasil meloloskan diri.<sup>54</sup> Adnan Arsal membantu memberikan alibi baginya, dalam pernyataannya kepada media lokal. Dan mengatakan bahwa Ipong sedang berada bersamanya di sebuah mesjid ketika peristiwa perampokan itu terjadi, dan ia aktif dalam kegiatan pendidikan agama, bukan tindak kekerasan, sejak bebas dari penjara.<sup>55</sup>

Sebulan setelah Ipong berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi, seorang bekas anggota ATR, bernama Budiyanto, yang telah membantu polisi menemukan keberadaan Ipong, ditembak mati ketika sedang makan diluar bersama istrinya di Gebangrejo, dekat Tanah Runtuh, pada tanggal 3 Agustus.<sup>56</sup> Keesokan paginya, dekat lokasi pembunuhan Budiyanto, seorang Muslim yang kedua, Sugito, ditembak di bagian kepala ketika sedang berjalan menuju sebuah mushollah untuk shalat Subuh. Karena sebagian besar korban dari apa yang disebut sebagai “penembakan misterius” sejak perjanjian Malino adalah orang Kristen, dan reaksi atas penembakan tidak terlalu signifikan, maka banyak yang menyimpulkan bahwa kejadian ini adalah pekerjaan orang dalam. Kapolda Sulawesi Tengah, Brigadir Jendral Polisi Aryanto Sutadi, mengumumkan bahwa tampaknya kedua orang itu ditembak karena telah membantu polisi dalam penyelidikan aksi kekerasan di Poso baru-baru ini.

---

<sup>47</sup> Pada bulan Juni 2003 Damanik dijatuhi hukuman tiga tahun penjara setelah sejumlah senjata api rakitan ditemukan di sebuah kendaraan dimana ia adalah salah seorang penumpangnya pada bulan Agustus 2002. Ia dibebaskan pada bulan November 2004.

<sup>48</sup> Hubungan Arsal dengan Damanik menurut isu menjadi kurang baik setelah pilkada di kabupaten Poso pada bulan Juni 2005, dimana seorang kandidat Kristen menang. Isu yang beredar yaitu Damanik secara diam-diam telah mendukung pemenang tersebut, walaupun ia telah meyakinkan Arsal bahwa ia akan mengizinkan seorang kandidat Muslim untuk menang, tetapi tidak ada bukti banyak bahwa Damanik memberi dukungan maupun berusaha meyakinkan Arsal sebagaimana diisukan. Pejabat bupati, Andi Asikin Suyuti, menugaskan AKP untuk mengurus uang Rp 3 milyar (\$300,000) yang disumbangkan oleh pemerintah Manokwari kepada pemerintah Poso. Walaupun uang tersebut belum diterima hingga awal September 2005, AKP tetap memelihara komunikasi untuk mempersiapkan penggunaan uang tersebut dalam membantu pembangunan tempat-tempat beribadah dan membantu menguatkan segi ekonomi para mantan kombatan. Beberapa bulan sebelumnya, ketika sebuah polemik muncul mengenai apakah masa jabatan Suyuti sebagai pejabat sementara sebaiknya diperpanjang atau tidak, karena adanya tuduhan terlibat kasus korupsi, anggota AKP datang ke Jakarta untuk membelanya. Wawancara Crisis Group lewat telepon dengan Pdt. Damanik dan anggota GKST Crisis Center, September 2005; “Manokwari Bantu Rakyat Miskin Poso Miliaran Rupiah”, *Poso Post*, 12-20 Agustus 2005.

<sup>49</sup> Lihat Briefing Crisis Group di Asia N° 37, *Decentralisation and Conflict in Indonesia: The Mamasa Case (Desentralisasi dan Konflik di Indonesia: Kasus Mamasa)*, 3 Mei 2005.

---

<sup>50</sup> Untuk daftar tindak pelanggaran lain yang diduga dilakukan oleh Ipong, lihat Laporan Crisis Group, *Jihad in Central Sulawesi (Jihad di Sulawesi Tengah)*, op. cit., hal. 19.

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Seseorang bernama Tukiran sedang disidang untuk kasus ini. Wawancara Crisis Group lewat telepon dengan Kepala Polisi Poso, Agustus 2005.

<sup>53</sup> Wawancara Crisis Group, September 2005.

<sup>54</sup> Contohnya lihat, “Polisi Memburu Tersangka Kekerasan di Poso”, *liputan6.com*, 2 July 2005. Beberapa laporan media mengenai upaya penangkapan Ipong, telah salah menyebut Ipong sebagai tersangka pembunuhan jaksa penuntut umum Ferry Silalahi di Palu dan seorang pendeta Palu Susianti Tinulele.

<sup>55</sup> “Jamin bukan pelakunya”, *Radar Sulteng*, 4 Juli 2005, hal. 9. Alibi ini mungkin memang benar, sehubungan dengan Ipong tidak terlibat secara langsung dalam aksi perampokan tersebut.

<sup>56</sup> Wawancara Crisis Group di Jakarta, Palu, Agustus 2005.

## 2. Korupsi

Sekelompok aktivis LSM dan pemuka masyarakat setempat menyimpulkan bahwa serangan bom di Tentena diorganisir oleh oknum pejabat setempat yang ingin mengganggu penyelidikan kasus korupsi yang sedang berjalan di Poso, dan melindungi sejumlah individu yang cukup berkuasa dari tuntutan hukum.<sup>57</sup> Teorinya yaitu serangan bom tersebut akan memonopoli perhatian pihak kepolisian, dan mungkin juga akan berakibat dimutasikannya Kapolda Aryanto Sutadi, yang sedang memimpin sebuah investigasi atas penyalahgunaan dana bantuan kemanusiaan senilai lebih dari Rp 2 milyar yang seharusnya diberikan kepada para pengungsi di Poso.<sup>58</sup> Bagi banyak orang diluar Poso, teori itu kelihatannya tidak mungkin. Mengapa koruptor melancarkan sebuah serangan mematikan yang tidak pandang bulu terhadap warga sipil, dan bukan menyerang individu yang memiliki informasi penting yang dapat menyeret mereka ke pengadilan? Namun untuk sebagian masyarakat setempat, karena sudah pernah ada kasus kekerasan yang terjadi sebelumnya yang terkait dengan kasus korupsi, hal ini mendukung kesimpulan semacam itu.

Pada tanggal 4 November 2004, Carminelis Ndele, kepala desa Pinedapa di daerah Poso Pesisir, ditemukan terbunuh. Kepala Ndele dibuang ke Sayo, daerah pinggiran Poso Kota, sementara badannya ditemukan di Poso Pesisir, beberapa kilometer dari rumahnya. Ndele adalah salah seorang dari tigabelas kepala desa yang menerima sebagian dari dana bantuan kemanusiaan senilai Rp 2,2

milyar untuk dibagikan kepada para pengungsi antara bulan Agustus dan September 2004. Sebagian besar dari dana ini telah digelapkan oleh sebuah tim dari Dinas Sosial kabupaten, yang telah ditunjuk untuk menyalurkan dana tersebut.<sup>59</sup> Dua anggota dari tim penyalur telah mengunjungi Ndele pada hari ia menerima alokasi dana sebesar Rp 75 juta untuk desanya. Seseorang yang mirip dengan salah satu dari mereka, Ahmad Laparigi, juga menjemput Ndele dari rumahnya pada malam ia dibunuh.<sup>60</sup> Pada tanggal 8 November, polisi menangkap Laparigi dengan menggunakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme – sekarang diterapkan dalam hampir seluruh kasus kekerasan di Poso dan Maluku – tetapi kemudian hanya menuntutnya dengan dakwaan korupsi.<sup>61</sup>

Peristiwa lain yang mengaitkan kasus korupsi dengan peristiwa kekerasan yaitu peledakan dua bom dengan daya ledak rendah didepan dua buah kantor LSM di Poso pada tanggal 28 April 2005, yang menyebabkan kerusakan kecil pada bangunan kantor. LSM yang dituju yaitu Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil (LPMS), dan Pusat Rekonsiliasi Konflik dan Perdamaian Poso (PRKP), telah melakukan kampanye melawan korupsi di Poso, termasuk menuntut diselidikinya pejabat Bupati, Andi Asikin Suyuti, yang juga kepala dinas Kesejahteraan Sosial pemerintah propinsi Sulawesi Tengah. Pada akhir September 2005, polisi menahan Mad (kependekan dari Ahmad) Haji Sun, kadang-kadang juga disebut Akhmat Sum dan Ali Maksum, terkait dengan pengeboman.<sup>62</sup>

<sup>57</sup> Kesaksian dalam interogasi polisi terhadap dua orang yang disidang yaitu, Ahmad Laparigi dan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Poso, Anwar Ali, menyebutkan beberapa nama pejabat penting di tingkat kabupaten dan propinsi. Ali mengklaim bahwa ia telah memberikan uang sebesar Rp. 605 juta (\$60,500) yang seharusnya diterima oleh pengungsi kepada Joko, wakil Badan Intelijen Nasional (BIN) di Sulawesi Tengah, dan Raden Badri, bekas kepala Kantor Kejaksaan Poso. Laparigi mengklaim bahwa Abdul Kadir Sidik, pegawai negeri sipil yang ditugaskan dalam tim distribusi, telah mengatakan kepadanya bahwa uang sekitar Rp satu milyar akan dialirkan dan ia telah melihat catatan yang menyebutkan bahwa uang sejumlah antara Rp 30 juta dan Rp 100 juta akan dibayarkan kepada Kepala Kantor Kejaksaan Kabupaten Poso, Kepala dan Wakil Kepala Kepolisian Poso, Bupati Poso, Kepala Reserse dan Kriminal Kepolisian Poso, Sekretaris Kabupaten Poso, seorang anggota kepolisian Poso dan dirinya sendiri.

<sup>58</sup> Ada kejadian semacam itu sebelumnya. Deddy Woerjantono, yang pada saat itu menjabat sebagai Kapolres di Poso, dicopot pada tahun 2000 setelah kerusuhan kedua di Poso, pada saat Polres Poso sedang mengusut kasus korupsi Kredit Usaha Tani (KUT). Secara kebetulan, Sutadi telah dirotasi kepada sebuah penugasan baru, empat bulan setelah serangan bom, ketika ia ditugaskan sebagai kepala Divisi Narkotika di Mabes Polri pada bulan September 2005.

<sup>59</sup> Tim tersebut menyerahkan dana kepada para kepala desa, yang selanjutnya seharusnya membagikan uang tersebut kepada keluarga yang berhak menerima. Empat orang dari anggota tim distribusi telah terbukti bersalah untuk kasus korupsi, bersama dengan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Poso.

<sup>60</sup> Laporan Polisi No. Pol: LP / 354 / XI / Res Poso, 8 November 2004. Laparigi (53), seorang pedagang ikan, mengakui bahwa ia dan Abdul Kadir Sidik telah pergi ke Pinedapa setelah Ndele menerima uang, untuk memeriksa apakah ia masih menyimpannya. Kesaksian Ahmad Alimun Laparigi dalam berkas Andi Makassar dan Ahmad Alimun Laparigi, 9 November 2004.

<sup>61</sup> Pada hari yang sama, seorang anggota tim yang lain, Andi Makassar, juga ditangkap dengan menggunakan UU Anti-Terror, menurut laporan karena dicurigai terkait dengan sebuah peristiwa penembakan diluar gereja Bethani di Poso pada bulan Oktober 2004. Seperti Laparigi, ia hanya didakwa untuk kasus korupsi. Tetapi Makassar, diketahui telah sering memberikan sedikit sumbangan kepada kelompok mujahidin setempat, setiap kali berjumlah kurang dari Rp 1 juta. Wawancara Crisis Group, Juni 2005.

<sup>62</sup> "Pelaku Bom Poso Ditangkap", Koran Tempo, 26 September 2005; "Wanted man in Poso attacks captured (Orang yang dicari dalam aksi penyerangan di Poso ditangkap)", Jakarta Post, 26 September 2005, hal. 4. Posisi Mad sudah mulai tertekan dua minggu sebelumnya ketika ia divonis untuk dua

Seorang kontraktor bangunan dan bekas ketua organisasi Pemuda Pancasila cabang Poso – sebuah organisasi yang pada masa rejim Soeharto memiliki reputasi sebagai kumpulan preman yang memiliki hubungan dengan Golkar – Mad juga memberikan gambaran lain mengenai betapa kompleksnya jaringan dibelakang tindak kekerasan. Dilihat memiliki hubungan dekat dengan Suyuti (pejabat bupati Poso), dan beberapa pejabat setempat yang lain, sebagian lewat jabatannya di Pemuda Pancasila dan Golkar pada masa sebelumnya, ia pun diketahui memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok mujahidin di Poso dan diluar Poso.<sup>63</sup> Ia diyakini membantu Aris Munandar, ketua KOMPAK Solo, untuk berdagang biji cokelat pada saat konflik sedang memasuki masa puncaknya. Dan menurut laporan, ia juga dekat dengan Agung Hamid, ketua Laskar Jundullah yang dihukum seumur hidup pada bulan Agustus 2005 atas keterlibatannya dalam bom Makassar pada bulan Desember 2003.<sup>64</sup> Ia juga sering terlihat bersama Ipong di Poso, setelah Ipong dibebaskan dari penjara, dan diyakini telah membantu Ipong melarikan diri ke Jawa.<sup>65</sup> Kontak Mad kelihatannya telah membuatnya sebagai seorang penghubung yang ideal antara pejabat setempat dengan mereka yang memiliki akses ke bom.

---

buah kasus – satu kasus narkoba, satu lagi terorisme – pada hari yang sama. Untuk kasus kepemilikan narkoba, Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan hukuman enam bulan penjara kepadanya. Setelah menjatuhkan hukuman kepadanya untuk kasus narkoba, ia dijatuhkan vonis tak bersalah untuk tuntutan yang lebih berat yaitu ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut, dengan menggunakan UU Anti-Teror. Tetapi tetap dikenai empat bulan penjara untuk tuntutan yang lebih ringan yaitu “perbuatan yang tidak menyenangkan”, dibawah KUHP. Tuntutan ini karena ia telah mengirim pesan SMS berisi ancaman kepada cabang Bank Mandiri di Palu, dimana Mad memiliki kredit bermasalah. Lihat “Sehari, Ahmad H Ali Divonis Dua kali”, Radar Sulteng, 6 September 2005; “Tersangka Teror Bom di Bank Mandiri Ditangkap”, detik.com, 21 Juni 2004; “Divonis Juli, Olky Belum Dieksekusi”, Radar Sulteng, 24 Agustus 2005, hal. 6,7.

<sup>63</sup> Mad juga anggota Aliansi Kemanusiaan Poso (Poso Humanitarian Alliance, AKP), dimana anggotanya datang ke Jakarta pada bulan Mei untuk membela Suyuti agar masa jabatannya diperpanjang. Pada saat yang sama, beberapa aktivis LSM datang ke Jakarta untuk melaporkan kecurigaan keterlibatan Suyuti kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

<sup>64</sup> Setelah Mad ditangkap pada bulan September 2005, Kapolda Sulawesi Tengah yang sudah tidak menjabat lagi, Aryanto Sutadi, menyatakan bahwa Mad sebelumnya pernah ditanyai mengenai Hamid, setelah sebuah SMS dari Hamid ditemukan dalam handphonenya. Wawancara Crisis Group. Mengenai hal yang kedua, lihat “Pelaku Bom Poso Ditangkap”, *Koran Tempo*, 26 September 2005.

<sup>65</sup> Juga mempunyai hubungan dengan anggota Mujahidin Kayamanya.

Tetapi Mad Haji Sun, Laparigi dan Makassar, tidak dicurigai terlibat dalam serangan bom Tentena. Dengan ditangkapnya dua orang lain yang terlibat dalam kasus korupsi, sehubungan dengan kasus Tentena, semakin menguatkan keyakinan bahwa hubungan (bom Tentena) dengan kasus korupsi akan mencuat. Tetapi saat ini tidak satupun dari mereka yang dijadikan tersangka untuk kasus bom Tentena. Yang pertama, Abdul Kadir Sidik, adalah seorang pegawai negeri sipil propinsi, yang juga bertugas sebagai anggota tim penyalur di tingkat kabupaten. Pada saat peledakan bom Tentena, ia sedang diadili sehubungan dengan kasus penyelewengan distribusi dana bantuan kemanusiaan dan seharusnya berada dalam tahanan.<sup>66</sup> Tetapi, bukannya berada dalam penjara, polisi menangkapnya ketika ia dalam perjalanan pulang ke Poso dari kota Ampana yang terletak di pinggir pantai, bersama rekannya Ismet, seorang pegawai Dinas Kesehatan Poso. Ismet disebut dalam BAP, telah menerima sebagian kecil dari dana yang digelapkan, dan aktivis LSM lokal mengklaim ia telah secara aktif memobilisasi perlawanan terhadap kampanye anti korupsi.<sup>67</sup> Sebentar kemudian Ismet dibebaskan. Setelah itu Sidik dihukum penjara atas kasus korupsi.

### C. PARA TERSANGKA

Mereka yang ditangkap setelah peledakan bom secara umum dapat dibagi menjadi tiga kelompok:<sup>68</sup>

**Para Tersangka dari Rumah Tahanan Poso.** Polri mengumumkan pada bulan Juni bahwa mereka menemukan bukti forensik yang mengaitkan dua orang yang memiliki hubungan dengan Rumah Tahanan Poso dengan kasus bom Tentena. Mereka adalah Hasman, kepala rumah tahanan Poso, dan Abdul Kadir Sidik. Menurut polisi, ditemukan serbuk TNT di mobil Sidik dan

---

<sup>66</sup> Ketidakberadaannya di penjara bukan dengan sendirinya suatu hal yang mencurigakan. Sudah diketahui umum bahwa para tahanan dapat melakukan transaksi gelap dengan petugas penjara agar dapat keluar masuk penjara dengan cukup bebas, dan Sidik menurut berita pernah dilihat berada diluar penjara pada beberapa kesempatan sebelumnya. Laporan Media juga menyatakan bahwa Sidik pernah diberikan penangguhan penahanan sementara tidak lama sebelum bom Tentena, tetapi tidak kembali ke penjara ketika penangguhan itu sudah habis masanya. Untuk poin yang terakhir, lihat “Menguat, Indikasi LP Poso Dijadikan Tempat Persiapan Peledakan Bom”, *Kompas*, 4 Juni 2005.

<sup>67</sup> Sepengetahuan Crisis Group, Ismet tidak sedang diinvestigasi untuk kasus korupsi. Wawancara Crisis Group dengan aktivis LSM Sulawesi Tengah, Juni 2005.

<sup>68</sup> Dua orang anggota (Kopassus) juga telah segera ditangkap setelah terjadinya bom Tentena. Polri tidak mempunyai wewenang untuk menginterogasi anggota TNI, dan mereka cepat-cepat dilepaskan.

sepatu Hasman. Hasman ditangkap bersama dengan dua orang tahanan bernama Suratman dan Jufri, serta seorang wanita bernama Tanri Firna, di pos pemeriksaan polisi dalam perjalanan menuju Palu pada tanggal 29 Mei. Sidik, yang seharusnya berada di penjara untuk menunggu proses pengadilan dalam kasus korupsi, ditangkap di desa Tumbiano, Kabupaten Tojo Una-Una. Tapi tak seorangpun dari kelompok ini yang dijadikan tersangka untuk kasus pengeboman. Hasman hanya dikenai tuduhan memiliki senjata api dan senjata lain tanpa ijin, sementara Suratman dan Jufri dituduh melanggar status tahanan mereka. Abdul Kadir Sidik tetap dipenjara setelah dijatuhi hukuman untuk kasus korupsi.<sup>69</sup>

**Para Tersangka dari Pandanjaya.** Polri menangkap sepuluh orang di Pandanjaya, dekat Pendolo, ke arah Selatan dari Tentena, dekat perbatasan Sulawesi Selatan, pada awal Juni. Menurut Polisi, penangkapan tersebut berdasarkan informasi yang menyebutkan bahwa mereka telah terlibat peristiwa kekerasan yang terjadi sekitar enam minggu sebelumnya di Mamasa, Sulawesi Barat, tidak jauh dari Poso, dimana lima orang terbunuh. Mungkin karena dekatnya waktu dan jarak, antara Mamasa dan peristiwa bom Tentena, dan karena beberapa dari tahanan telah mengakui hubungan dengan peristiwa pengeboman lain, dan karena Pandanjaya (kadang-kadang juga disebut Pandajaya) dan Pendolo yang lokasinya tidak jauh dari Pandanjaya, telah menjadi pusat pelatihan dan operasi bagi beberapa kelompok mujahidin, berkembang spekulasi bahwa kesepuluh tahanan tersebut terkait dengan bom Tentena. Tetapi, belum ada bukti kuat yang mencuat.<sup>70</sup> Sebuah LSM lokal, LPS-HAM, atas nama

orang yang ditahan mengajukan petisi pra-peradilan setelah mereka dilepaskan. Pengadilan Poso memutuskan bahwa penahanan Jumari dan Mastur Saputra, tidak sesuai hukum dan memberikan mereka kompensasi. Tetapi tidak begitu halnya bagi dua orang tahanan yang lain.<sup>71</sup>

**Para Tersangka dari Dolong.** Dua orang dari Dolong, yaitu daerah yang terletak di kepulauan Togian, lepas pantai Sulawesi Tengah, ke arah Timur dari Poso, pada awalnya dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus bom Tentena. Mereka adalah Erwin Mardani, alias Jodi, dan Muhamad Safri Dekuna alias Andu atau Andreas. Erwin adalah salah seorang anggota Mujahidin Kayamanya yang terlibat dalam aksi serangan ke desa Loki, dan terluka oleh tembakan polisi Brimob. Ia menikahi seorang wanita dari Tasikmalaya, Jawa Barat, dan pernikahan ini diatur oleh Abdullah Sonata, seorang veteran Ambon yang berteman dengan Asep alias Dahlan. Erwin pernah dipenjarakan di Palu atas tuduhan menyembunyikan seorang tersangka kasus pembunuhan seorang Jaksa di Palu pada tahun 2004, dan baru dibebaskan pada bulan Maret 2005.<sup>72</sup> Polisi menuduh Erwin sebagai pelaku yang meletakkan bom di pasar Tentena. Walaupun setelah terluka dalam serangan di Loki sulit baginya (tapi bukannya tidak mungkin) untuk sampai di Tentena tepat pada waktunya untuk melakukan hal itu pada tanggal 28 Mei, karena diyakini ia telah meninggalkan Ambon ke Sulawesi Utara dengan kapal laut pada tanggal 25 Mei. Bagaimanapun juga, hingga saat ini ia masih buron.

Andu adalah sesama anggota kelompok Mujahidin Kayamanya yang berasal dari desa yang sama dengan Erwin, dan seperti Erwin juga pernah mengikuti latihan tempur di kampus STAIN di Ambon pada tahun 2001. Polisi menyebutnya sebagai tersangka dalam kasus bom Tentena. Tapi kelihatannya, sangkaan ini lebih berdasarkan

---

<sup>69</sup> Ketika ia dijadikan tersangka untuk kasus bom Tentena (untuk waktu yang singkat), ia mengajukan sebuah permohonan praperadilan terhadap Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolres Poso, yang menyatakan bahwa penahanan terhadapnya tidak sesuai hukum. Tetapi pengadilan Poso menolak permohonan itu pada tanggal 23 Juni. "Pra-peradilan Kadir Ditolak", *Radar Sulteng*, 24 Juni 2005, hal. 8; "Polda dan Polres dipraperadilan", *Radar Sulteng*, 11 June 2005, p. 10.

<sup>70</sup> Wawancara lewat telepon dengan Kapolres Poso AKBP Soleh Hidayat, 25 April 2005. Sebagai buntut dari peristiwa kekerasan di Mamasa, tiga orang ditangkap di Pandanjaya – yaitu Saifulloh, Sucipto dan Suryadi – dan yang keempat, Amiruddin, di Mamasa. Amiruddin berasal dari Poso, sementara menurut laporan Saifulloh adalah seorang anggota KOMPAK dari Jawa Barat. Sucipto berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, dan Suryadi dari Pandanjaya. Saifulloh dibawa ke Yogyakarta sebagai tersangka untuk dua buah kasus pengeboman disana yang terjadi pada tahun 2000, dan mengatakan kepada polisi Yogyakarta bahwa pada tahun 2001, ia telah membuat 50 buah bom untuk seseorang yang bernama Ahmad Yani. Ahmad Yani kemudian ditangkap di Pandanjaya pada bulan Juni 2005, tetapi kemudian dilepaskan kembali. Wawancara Crisis Group dengan Kapolda Sulawesi Tengah Brigadir Jendral Polisi Aryanto Sutadi, 18 Agustus 2005. Wawancara lewat telepon dengan Kapolres Poso, AKBP Soleh

---

Hidayat, 25 Agustus 2005. Polda Sulawesi Selatan menyerahkan berkas kasus Amiruddin dan Sucipto kepada jaksa penuntut umum di Polewali, Sulawesi Barat, pada bulan Juni atas tuduhan terlibat dalam peristiwa kekerasan bulan April di Mamasa. Dua orang lain, Dandong dan Tating, juga dituntut dengan tuduhan terlibat dalam peristiwa Mamasa. Lihat BAP Tersangka Dilimpahkan ke Kejari", *Fajar Online*, 30 Juni 2005.

<sup>71</sup> "Dua Dikabulkan, Dua Ditolak", *Radar Sulteng*, 15 Juli 2005, hal. 9. Wawancara Crisis Group lewat telepon, Oktober 2005.

<sup>72</sup> Erwin ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2004 dan dituntut dengan tuduhan menyembunyikan Sofyan Djumpai, seorang anggota Mujahidin Kayamanya, yang pada saat itu sedang dicari oleh polisi untuk kasus pembunuhan jaksa Sulawesi Tengah Ferry Silalahi. Vonis No. 01/Pid.B/2005/PN.Palu dalam kasus Erwin Mardani alias Jodi alias Wiwin, 30 Maret 2005. Erwin juga dituntut dengan tuduhan memiliki pistol tanpa ijin. Pada bulan Agustus 2005 kasus ini telah naik banding ke Mahkamah Agung, setelah Erwin divonis tak bersalah di Pengadilan Negeri Palu dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

pada masa lalunya dengan kelompok mujahidin, daripada oleh bukti-bukti kuat.<sup>73</sup> Diyakini ia telah tinggal di Dolong paling sedikit selama setahun, sebelum ia ditangkap.<sup>74</sup> Setelah mengetahui bahwa polisi mencarinya, awalnya Andu berusaha melarikan diri, tetapi kemudian pada tanggal 4 Juni 2005 menyerahkan diri ke kantor polisi di Wakai (yang daerah tugasnya meliputi Dolong), setelah menerima jaminan dari polisi bahwa ia tidak akan diperlakukan secara buruk.<sup>75</sup> Tetapi setelah seminggu dalam tahanan, ia dipukuli begitu rupa hingga harus dirawat di rumah sakit di Poso dan Makassar. Ia dibebaskan pada tanggal 20 Juni tanpa dikenai tuduhan.<sup>76</sup>

Karena itu, dari para tersangka awal, polisi tidak berhasil menjadikan siapapun sebagai tersangka. Polisi mengumumkan bahwa penyelidikan mereka berfokus pada Erwin Mardani dan seseorang dengan inisial "AT", dimana polisi menuduhnya sebagai pelaku yang meletakkan bom di Tentena. AT adalah Aat, tadinya seorang mujahid yang berasal dari Bonesompe (sebuah kelurahan di Poso Kota). Tidak jelas apa yang menjadi dasar sangkaan, dan pertanyaan mengenai siapa yang melakukan pengeboman di Tentena tetap menjadi misteri.

## V. KEADILAN, REINTEGRASI DAN JARINGAN-JARINGAN

Jaringan pribadi, yang terbentuk dari pengalaman bersama di Poso dan Maluku, merupakan mesin penghasil operasi mujahidin di Indonesia. Dan tidak ada keraguan bahwa negara ini akan menjadi lebih aman jika jaringan tersebut dapat dilemahkan, atau tenaga dan pikiran para anggotanya dialihkan ke tujuan yang lebih konstruktif. Hal ini bukan berarti dengan sendirinya dapat langsung mengakhiri kekerasan, tetapi ada cara-cara yang dapat memulai proses ke arah itu. Salah satunya yaitu dengan upaya penegakan hukum yang lebih baik. Cara lain yaitu dengan memperbarui perhatian terhadap upaya mengintegrasikan kembali para mujahidin yang mungkin telah menganggap konflik sebagai sebuah jalan hidup.

### A. KEADILAN DAN KEAMANAN

Setiap upaya penanganan terhadap kegiatan jaringan dipersulit dengan budaya kebal hukum yang menjadi dominan di Poso dan Maluku dari tahun 1999 hingga tahun 2003, dan sampai tingkat tertentu terus berlanjut hingga hari ini. Dengan beberapa perkecualian yang signifikan, para pelaku tindak kekerasan di daerah ini tidak terungkap, tidak dihukum atau hanya menerima hukuman ringan dan cepat dibebaskan. Akibatnya sudah jelas, yaitu: mereka yang menerima hukuman ringan atau menerima vonis tak bersalah yang patut dipertanyakan atas tindak kejahatan yang mereka lakukan, pada akhirnya sering melakukan tindak kekerasan yang lebih jauh. Karena mereka berpikir, jika tertangkap, hukumannya tidak akan terlalu berat.

Di kedua daerah konflik, sistem keadilan tidak berjalan pada masa pertempuran sedang panas-panasnya, dan belum sepenuhnya pulih karena beberapa hal:

- Perbuatan polisi, khususnya salah tangkap dan memukuli tersangka pada saat interogasi, telah menjauhkan polisi dari masyarakat, dan menyebabkan masyarakat memberi dukungan kepada aksi demo terhadap polisi, atas nama para tahanan, dan kadang-kadang mengakibatkan para tahanan ini dibebaskan oleh polisi. Di Poso, Forum Silaturahmi dan Perjuangan Umat Islam (FSPUI), memimpin aksi demo pada tanggal 8 dan 10 Juni 2005, menuntut dibebaskannya beberapa orang tersangka yang sedang ditahan oleh polisi, serta dilakukannya investigasi atas beberapa kasus yang

<sup>73</sup> Pada bulan Oktober 2001, ia adalah salah satu dari 32 orang yang ditangkap di Mapane, Poso Pesisir, dalam peristiwa Mapane, yaitu ketika pasukan Brimob menangkap sejumlah mujahidin, memukuli dan mempermalukan mereka, dan menembak seorang hingga tewas di lokasi kejadian. Pengadilan Negeri Palu kemudian memutuskan bahwa penahanan keduapuluh tujuh orang di antaranya, termasuk Andu, tidak sesuai hukum dan memerintahkan polisi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 200,000 kepada masing-masing tahanan. "Tuntutan Pra Peradilan Dikabulkan, Tahanan Tragedi Mapane Dibebaskan", *Bel@* (Berita Laskar Jihad), 12 Desember 2001.

<sup>74</sup> Wawancara Crisis Group lewat telepon dengan seorang Poso, Juni 2005.

<sup>75</sup> Wawancara Crisis Group, Agustus 2005. "Tersangka Kasus Peledakan Bom Serahkan Diri", *Republika*, 5 Juni 2005.

<sup>76</sup> Tanggal ia dibebaskan dari tahanan polisi yaitu tanggal 20 Juni 2005, tetapi ia baru bisa pulang kerumah pada tanggal 22 Juni, yaitu pada saat ia sudah diperbolehkan pulang oleh rumah sakit Poso. "Polres Poso Lepas Andreas: Tak Terlibat Bom Tentena", *Radar Sulteng*, 24 Juni 2005, hal. 1, 15.

masih belum dapat dituntaskan.<sup>77</sup> Pada saat aksi demo yang kedua kali, polisi melepaskan tiga orang dan membenarkan pembebasan tersebut dengan menyatakan bahwa masa penangkapan mereka dengan menggunakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah habis.<sup>78</sup>

- Di masa lalu, rasa tidak aman dan kebutuhan untuk pertahanan yang dirasakan oleh masyarakat berarti mereka yang melakukan tindak kekerasan terhadap pihak lawan, kemudian sering dianggap sebagai pahlawan, dan hal ini menghambat penyelidikan. Contohnya, polisi di Maluku mengakui bahwa baru tahun 2003 mereka dapat melakukan pengeledahan di perkampungan tertentu. Itupun, mereka harus melakukan “zig-zag” dari perkampungan Kristen hari ini, besoknya ke perkampungan Muslim, untuk memberikan kesan berimbang.<sup>79</sup>
- Aparatur hukum, yaitu polisi, jaksa, pengacara/pembela dan hakim, telah menjadi sasaran intimidasi, dan perbuatan yang lebih buruk lagi. Ferry Silalahi, seorang jaksa yang sedang menangani beberapa kasus terorisme dan konflik, ditembak mati di Palu pada bulan Mei 2004.<sup>80</sup> Persidangan kasus-kasus yang berhubungan dengan konflik di Poso, pada masa panas-panasnya konflik lebih sering dilakukan di ibukota propinsi di Palu, karena tidak aman untuk melakukan persidangan di Poso.<sup>81</sup>
- Saling tidak percaya sering menandai hubungan antara polisi, jaksa dan hakim di daerah konflik. Perwira polisi lebih senang jika jaksa yang menangani kasus konflik adalah jaksa dari luar,

atau bahkan jika kasus konflik diadili di Jakarta, sebagian karena mereka yakin aparat hukum setempat mungkin akan membuat *deal* dengan terdakwa, atau diintimidasi.<sup>82</sup> Pada bulan April 2005, Direktur Reserse dan Kriminal (Direskrim) Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Tatang Somantri, mengeluh kepada pers bahwa para hakim di Pengadilan Palu menjatuhkan hukuman ringan kepada kasus-kasus yang disidang dengan menggunakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>83</sup> Para hakim kemudian meminta polisi untuk lebih profesional dalam mengembangkan kasus.<sup>84</sup>

Sebagian dari masalah ini lebih mudah ditangani dari yang lain.

### 1. Memperbaiki hubungan antara Polisi dan Masyarakat

Walaupun keberhasilan proses penuntutan hukum atas tindak kriminal tergantung pada kinerja para jaksa dan hakim serta polisi, namun polisi yang paling banyak berhubungan langsung dengan masyarakat. Upaya penuntutan akan terus terhambat, selama hubungan polisi dengan masyarakat masih tidak baik. Masalah ini telah ada sejak lama dan bukan hanya terjadi saat ini, tetapi ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh polisi setempat maupun nasional untuk memperbaiki hal itu.

Perlakuan buruk terhadap tersangka setelah penangkapan adalah hal yang rutin, dan sering melibatkan pemukulan. Hal ini kontra produktif dan juga ilegal dalam KUHAP, belum lagi melanggar *International Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment of Punishment* (Konvensi Internasional Melawan Penyiksaan dan Hukuman dalam bentuk Perlakuan lain yang Buruk, Tidak Manusiawi atau Menjatuhkan Martabat), dimana Indonesia adalah salah satu negara yang telah ikut mengesahkannya. Perlakuan yang lebih baik terhadap tersangka akan membantu mengurangi kemarahan penduduk setempat terhadap upaya penahanan, dan mungkin akan meningkatkan kesediaan masyarakat untuk membantu polisi dalam penyelidikan mereka.

---

<sup>77</sup> Kasus-kasus yang dimaksudkan adalah kasus bom di Pasar Sentral Poso bulan November 2004, kasus pembunuhan empatbelas orang Muslim di dusun Buyung Katedo bulan Juli 2001, dan kasus pembunuhan massal di Pesantren Walisongo bulan Mei 2000. Dua kasus terakhir menjadi salah satu simbol ketidakadilan yang sering diangkat oleh pihak Muslim di Poso.

<sup>78</sup> Tiga orang yang dilepas yaitu Abdul Rauf, Jemari, dan Buchari. “Warga Poso Demo Lagi, Tiga Tahanan Dilepas”, *Radar Sulteng*, 11 Juni 2005.

<sup>79</sup> Wawancara Crisis Group dengan perwira polisi senior di Maluku, Juli 2005.

<sup>80</sup> Sofyan Djumpai alias Pian divonis bebas dalam kasus pembunuhan jaksa Ferry Silalahi pada bulan Maret 2005 tetapi kasus ini saat ini sedang naik banding. Dua orang anggota Mujahidin Kayamanya yang lain, yaitu Hence Said dan Farid Podungge, saat ini ditahan oleh Polda Sulawesi Tengah setelah mereka ditangkap di Yogyakarta pada bulan Juli 2005.

<sup>81</sup> Bahkan di Palu, sidang pengadilan tiga orang Katolik yang dijatuhi hukuman mati dilakukan dihadapan aksi demo yang cukup besar, dan kendaraan yang membawa para terdakwa ke tempat persidangan dilempari batu oleh para pengunjung rasa.

---

<sup>82</sup> Wawancara Crisis Group, Ambon, Sulawesi Tengah, Juli, Agustus 2005.

<sup>83</sup> Untuk beberapa kasus, para terdakwa dinyatakan tidak bersalah menurut UU Anti-Terror, tetapi dihukum dengan dakwaan yang lebih ringan dengan menggunakan UU Hukum Pidana.

<sup>84</sup> “Kasus Terorisme di Sulawesi Tengah Divonis Ringan”, *Koran Tempo*, 26 April 2005. Wawancara Crisis Group, Palu, Agustus 2005.



Polisi perlu memberi sanksi disiplin terhadap petugas mereka yang menyiksa tersangka, gagal melakukan penangkapan karena bersimpati terhadap salah satu komunitas, atau mereka sendiri terlibat dalam tindak kekerasan. Salah satu contoh disiplin yang gagal dan yang jelas yaitu kasus Bripda Syarif Tarabubun, yang tetap berada dalam kesatuan polisi di Ambon walau jelas-jelas ia terekam oleh kamera pada tahun 2003, sedang mengambil uang dari rekening seseorang yang belum lama dibunuh.<sup>85</sup> Saat ini ia dicari polisi atas keterlibatannya dalam sebuah aksi penembakan disebuah villa karaoke di desa Hative Besar, Ambon, yang terjadi pada tanggal 15 Februari 2005, dimana dua orang terbunuh.<sup>86</sup>

Beberapa hal dapat dilakukan untuk meningkatkan disiplin internal. Yang pertama yaitu dengan membentuk sebuah divisi urusan internal yang lengkap, dalam kesatuan Polri, yang memiliki wewenang dan kapasitas investigasi tersendiri, bukan unit provos seperti sekarang ini. Supaya penyelidikan yang serius terhadap kesalahan polisi dapat dilakukan tanpa kekhawatiran bahwa hal itu akan dihalangi oleh solidaritas profesi. Yang kedua yaitu dengan menghilangkan wewenang komandan polisi untuk menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan terhadap setiap pengaduan mengenai bawahan mereka, dan memberikan wewenang ini kepada sebuah badan khusus yang tidak memihak. Yang ketiga yaitu menyusun sebuah prosedur yang jelas dalam menangani pengaduan dari masyarakat. Dan sebagai tambahan, polisi yang dicurigai terlibat dalam tindak kejahatan menurut UU Hukum Pidana, seharusnya lebih banyak yang diajukan ke pengadilan umum. Saat ini, mereka sering hanya dikenai proses disiplin intern yang dilakukan oleh sidang disiplin dengan menggunakan beberapa Peraturan Pemerintah tentang disiplin, atau oleh komisi kode etik, dengan menggunakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan ini dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota kepolisian, tetapi dengan memperlakukan sebuah tindak pidana sebagai masalah disiplin internal,

---

<sup>85</sup> Tarabubun adalah seorang anggota Kepolisian Resor Ambon dan pulau-pulau Lease. Ia adalah ipar dari seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas kasus penculikan dan pembunuhan Fauzi Hasby, Edy Putra, dan Ahmad Saridup pada bulan Februari 2003 di Ambon, dan menurut laporan juga ikut terlibat pada saat penculikan. Ia diadili tetapi kemudian dinyatakan tak bersalah, meskipun ada bukti yang memperlihatkan Tarabubun sedang mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM milik Edy Putra dari sebuah ATM. Wawancara Crisis Group, Jakarta, Juni 2005. "Satu Demi Satu Teroris di Maluku Ditangkap", *radiovoxpopuli.com*, 21 Mei 2005.

<sup>86</sup> Seorang anggota polisi yang lain, Ismael Yamsehu, ditangkap atas keterlibatannya dalam aksi serangan ini, dan dipecat dari dinas kepolisian, dan harus menghadapi persidangan dalam PN Ambon.

hal itu dapat melindungi oknum polisi dari investigasi tindak pidana.

Para pendukung tahanan sering mampu mengontrol sudut pemberitaan di media, dan polisi sering harus menanggapi tuduhan bahwa mereka telah menangkap "aktivis", bukan individu yang mana polisi telah memiliki bukti yang kuat atas keterlibatan mereka dalam tindak kekerasan. Upaya lebih jauh untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan menjelaskan alasan penangkapan dapat membantu. Dalam sebuah contoh kasus yaitu, ketika penduduk kawasan Batumerah, Ambon, pada awalnya menghadang upaya penangkapan, polisi meminta seorang pejabat setempat dan tokoh pemuda untuk datang ke kantor polisi dan mengecek sendiri dengan mereka yang sudah berada dalam tahanan, bahwa tersangka yang akan ditahan memang terlibat. Setelah itu, polisi dapat melakukan penangkapan tanpa perlawanan lebih lanjut dari masyarakat.<sup>87</sup>

Hubungan polisi dengan masyarakat juga dapat diuntungkan jika proyek percontohan "community policing" yang telah berhasil ditempat lain juga diterapkan di Poso dan Ambon.

## 2. Menghadapi Masa Lalu

Di Maluku maupun Poso, rasa ketidakadilan, bercampur dengan hasrat untuk melakukan pembalasan, mengompromi sejumlah (tindak) kekerasan, khususnya bagi pelaku setempat. Dan tidak ada keraguan bahwa banyak sekali kasus pembunuhan, serangan pembakaran, dan perebutan tanah yang masih belum diusut dan tak terkompensasi. Secara realistis, sebagian besar dari kasus-kasus ini tidak akan pernah dituntut secara hukum. Bahkan upaya pencarian fakta yang serius lewat sebuah komisi kebenaran mungkin tidak akan terwujud dalam waktu dekat, sebagian karena khawatir akan mengganggu situasi damai yang masih rapuh. Sebuah Tim Investigasi Independen Nasional untuk Maluku dibentuk lewat Keputusan Presiden pada bulan Juni 2002, dengan tugas antara lain mengusut secara tuntas asal mula konflik tahun 1999. Lebih dari tiga tahun kemudian, hasil temuan tim ini belum pernah diumumkan kepada masyarakat umum.

Sebagai buntut peristiwa serangan di Loki, pada saat informasi baru mengenai sejumlah kasus yang belum terpecahkan mulai muncul, polisi di Maluku memutuskan untuk menerapkan kebijakan informal untuk tidak mengusut kasus-kasus yang terjadi sebelum tahun 2003, dengan alasan hal itu mungkin malah akan memperburuk situasi dengan mengobarkan kembali rasa permusuhan lama. Hal ini mungkin satu-satunya pendekatan yang paling mungkin dilakukan dalam keadaan seperti ini,

---

<sup>87</sup> Wawancara Crisis Group, Ambon, Juli 2005.

meskipun ada yang akan memandang setiap batas waktu sebagai kesewenang-wenangan. Tetapi jika tujuannya adalah untuk menghentikan kekerasan, polisi setempat harus memberikan prioritas terhadap tindak kejahatan yang baru terjadi. Dan dengan kembali dua tahun kebelakang, paling sedikit polisi dapat memastikan bahwa mereka-mereka yang terlibat dalam jaringan yang terkuak setelah kasus serangan di Loki akan dituntut secara hukum. Pemisahan kasus-kasus yang terjadi sebelum tahun 2003 berarti beberapa dari mereka tidak akan dijatuhi hukuman seberat yang kemungkinan seharusnya mereka terima. Contohnya Ongen Pattimura, yang ditahan setelah peristiwa Loki, sebelumnya telah dicari polisi untuk kasus pengeboman bulan April 2002 di Ambon yang menewaskan empat orang dan melukai lebih dari 50 orang.<sup>88</sup> Tidak satupun dari tindak kejahatan berikutnya yang dicurigai ia ikut terlibat menimbulkan korban sebanyak itu. Tetapi kemungkinan ia tidak akan pernah dituntut untuk kasus tersebut.

Setelah bom Tentena, beberapa kalangan lokal telah meminta dibentuknya sebuah Tim Gabungan Pencari Fakta untuk dimasukkan dalam Instruksi Presiden yang akan datang, yang diharapkan akan menangani masalah keamanan di Poso. Tetapi pandangan masyarakat setempat terbagi dalam melihat manfaat tim ini. Sebagian khawatir bahwa kekurangan tim sejenis di Maluku hanya akan terulang kembali. Dalam kasus Tim di Maluku, dekrit yang membentuk tim pencari fakta ini mengharuskan anggotanya untuk mengusut sebuah tumpukan masalah yang begitu besar dan berat, tanpa menetapkan kapan tugas tim ini berakhir, atau kapan laporan atas temuan mereka harus diumumkan kepada masyarakat. Ia juga tidak menetapkan apa yang akan dilakukan atas temuan tim pencari fakta, atau bagaimana staf administrasi dipenuhi, maupun mengenai anggaran yang pasti. Proses pencarian fakta di Poso harus didasarkan pada mufakat masyarakat setempat mengenai tugas yang akan diemban oleh tim pencari fakta, dan hal ini akan sulit, dan tampaknya tidak akan segera memberikan jalan keluar bagi rasa ketidakadilan yang mengompori aksi kekerasan.

### 3. Memberikan Rasa Aman

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, suasana tidak aman pada umumnya telah menjadikan sejumlah pelaku aksi kekerasan dianggap sebagai pahlawan setempat, karena mereka dipandang telah memberikan keadilan atau perlindungan yang tidak dapat diberikan atau tidak diberikan oleh aparat keamanan setempat.

Saat ini, keadaan keamanan secara keseluruhan di Maluku dan Poso telah membaik karena kombinasi beberapa hal, antara lain pengerahan pasukan Polri dan TNI, berjalannya waktu, serta upaya rekonsiliasi. Banyak dari pasukan tambahan ditempatkan di pos-pos pemeriksaan di perbatasan antar desa. Kehadiran mereka telah membantu mencegah konflik terbuka, tetapi kurang berhasil dalam mencegah aksi pengeboman, serangan 'tabrak lari', yaitu serangan yang dilancarkan tiba-tiba kemudian pelakunya melarikan diri yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil, dan kedatangan para pembuat onar yang sudah dikenal di desa-desa tertentu.

Tiga langkah berikut ini mungkin dapat membantu menangani rasa ketidakadilan, dan pada saat yang sama melemahkan jaringan, yaitu: pengawasan yang lebih baik terhadap peredaran senjata api dan bahan peledak; koordinasi yang lebih baik di antara badan intelijen untuk mencegah aksi penyerangan; dan hukuman yang serius bagi pelaku tindak kejahatan serius.

Tak seorangpun yang tahu ada berapa senjata api jenis "standard" (yaitu bukan buatan sendiri), yang berada ditangan pribadi/swasta atau disembunyikan di Poso dan Maluku. Persembunyian senjata yang ditemukan di kampus STAIN di Ambon sudah hampir pasti adalah satu diantara banyak yang lain. Tetapi pengeledahan yang dilakukan polisi untuk mencari dan menyita senjata, bom dan amunisi, tidak terlalu berhasil. Jika senjata tidak dapat ditemukan oleh kegiatan intelijen, sebuah upaya amnesti atau rencana pembelian kembali senjata mungkin patut dipertimbangkan. Tetapi hanya jika hal ini dikaitkan dengan proses pemulihan (konflik) yang lebih luas dan benar-benar dipikirkan lebih lanjut.<sup>89</sup> Pada bulan Desember 2004, Polda Sulawesi Tengah menawarkan sebesar Rp 5 juta bagi siapa saja yang menyerahkan senjata api jenis standard kepada polisi, tetapi jumlah itu lebih kecil dari yang dapat diterima di pasar gelap.<sup>90</sup> Pada saat yang sama, tidak ada gunanya (menerapkan) program pembelian kembali, jika supply senjata dari Mindanao atau dari aparat keamanan yang korup tetap tidak berkurang. Memang, jika harga yang ditawarkan cukup tinggi, mereka yang menyerahkan senjata dapat menjalankan perdagangan senjata dengan cara membeli dengan harga murah ke Filipina atau tempat lain, kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi kepada polisi.

<sup>88</sup> Serangan bom yang meledak di Jl Yan Pays pada tanggal 3 April 2002, terjadi tak lama sebelum serangan pembakaran di kantor gubernur. Lihat "Berbagai Peristiwa Pasca Malino II", *Suara Pembaruan*, 9 September 2002.

<sup>89</sup> Untuk masukan mengenai bagaimana pelucutan senjata sebaiknya dilakukan di Maluku dan Poso, lihat Arianto Sangaji, "Peredaran Ilegal Senjata Api di Sulawesi Tengah", Position paper no. 4, YTM dan LPMS, Palu, 2005, hal. 26.

<sup>90</sup> "Polda Sulteng Periksa 25 Saksi Bom Poso", *tempointeraktif*, 3 Desember 2004.

Koordinasi dan analisa intelijen tetap menjadi masalah, dan setiap serangan baru selalu disusul dengan diumumkannya kebijakan baru untuk memperbaiki koordinasi. Contohnya, pemerintah merencanakan untuk menghidupkan kembali badan koordinasi intelijen di daerah setelah terjadinya bom Tentena. Sama seperti setelah terjadinya pengeboman di Kedubes Australia pada bulan September 2004, pemerintah menyatakan akan membentuk sebuah satuan tugas untuk mengkoordinasi respon anti-teror di bidang penegakan hukum dan badan intelijen.<sup>91</sup> Instruksi Presiden yang akan datang kemungkinan juga akan menyinggung masalah koordinasi intelijen. Tetapi daripada menyusun langkah ad-hoc, mungkin lebih baik melakukan sebuah analisa sistematis mengenai mengapa badan intelijen gagal dalam kasus ini, dan dengan tujuan mengidentifikasi pemecahan yang efektif. Pada sisi yang substantif, memahami sifat dasar dari jaringan ad-hoc para mujahidin dan bagaimana mereka bekerja – dan menyebarkan informasi tersebut ke polisi setempat diseluruh negeri – menjadi hal penting untuk mencegah serangan dimasa datang. Di sisi administrasi, sebuah peninjauan mengenai dimana dan bagaimana koordinasi yang kurang, dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan dalam penyusunan naskah rancangan undang-undang intelijen, yang saat ini sedang dalam pertimbangan DPR. Dan secara lebih luas yang saat ini paling dibutuhkan yaitu menjadi sebuah peninjauan strategis terhadap bidang keamanan nasional yang perlu dilakukan.<sup>92</sup>

Langkah ketiga yang langsung akan memperlemah jaringan dan memperbaiki situasi keamanan yaitu memperlakukan setiap pelanggaran hukum di wilayah konflik sama seriusnya seperti tindak kejahatan lain di Indonesia. Hukuman yang ringan dan vonis tidak bersalah yang patut dipertanyakan berarti anggota jaringan yang melakukan tindak kekerasan akan dibebaskan dengan cepat, yang mana mereka kemudian akan melanjutkan melakukan aksi kekerasan yang baru. Erwin Mardani yang dibebaskan pada bulan Maret 2005, kemudian terlibat dalam aksi penyerangan ke desa Loki di Seram hanya dua bulan setelah ia bebas dari penjara di Palu.<sup>93</sup> Di

Poso, Andi Ipong sedang dicari oleh polisi atas keterlibatannya dalam kasus perampokan bersenjata yang terjadi pada bulan Maret 2005, hanya beberapa bulan setelah ia menyelesaikan hukumannya di penjara untuk kasus perampokan sebelumnya.

## B. MEMBONGKAR JARINGAN

Strategi yang kedua yaitu dengan mengikutsertakan secara langsung para veteran lokal dari peristiwa kekerasan di Poso dan Maluku, dan mengembangkan sebuah program untuk mengintegrasikan mereka kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat. Program semacam itu mungkin pada awalnya dapat dilakukan di wilayah konflik tersebut, dengan melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai oleh beberapa LSM di kedua wilayah konflik dalam bekerja sama dengan mereka yang pernah bertempur di wilayah konflik. Jelas bahwa hal ini tidak akan menjangkau anggota jaringan yang berlokasi di daerah lain, tetapi jika mata rantai di wilayah setempat menjadi lemah, kemampuan jaringan secara keseluruhan untuk melakukan kerusakan dapat dikurangi.

Tiga faktor yang secara khusus dapat membuat program reintegrasi menjadi menarik yaitu:

- Agar program dapat berhasil (dan diterima oleh masyarakat setempat), ia harus terbuka bagi para mantan kombatan pihak Muslim maupun Kristen. Hal ini mungkin akan dapat membantu pemulihan wilayah konflik secara lebih umum;
- Karena hanya sebagian kecil dari mantan kombatan dari daerah setempat yang termotivasi oleh ajaran-ajaran ideologis yang kaku, mereka mungkin akan tertarik dengan harapan atas kesempatan ekonomi; dan
- Penahanan dan hukuman ringan yang telah dijalani oleh banyak pelaku tindak kejahatan yang sudah disidang atas aksi kekerasan yang mereka lakukan, telah menghasilkan sebuah kelompok yang mana orang-orang didalamnya mudah diidentifikasi. Dan sebuah program dapat disusun dengan acuan kumpulan orang-orang ini.

Kita patut mencoba untuk memberikan pilihan lain selain melakukan aksi kekerasan, kepada paling sedikit sebagian dari mereka. Salah satu kemungkinan yaitu dengan menggabungkan program reintegrasi dengan program asimilasi yang sudah diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Dalam program ini, tahanan yang telah menjalani paling sedikit setengah dari masa tahanan mereka, pada siang hari diserahkan pemeliharaannya kepada salah seorang anggota masyarakat. Karena itu secara teori (walaupun pada prakteknya tidak selalu begitu) para tahanan

<sup>91</sup> Satuan Tugas ini tidak pernah dibentuk dan fungsinya sudah diperankan dengan Desk Anti-Terror Kementerian Politik dan Keamanan. Lihat Laporan Crisis Group di Asia N°90, *Indonesia: Rethinking Internal Security Strategy (Indonesia: Memikirkan kembali Strategi Masalah Keamanan Internal)*, 20 Desember 2004, hal. 7.

<sup>92</sup> Ibid, hal. 13-16.

<sup>93</sup> Pengadilan Negeri Palu menyatakan bahwa Mardani tidak terbukti menyembunyikan Sofyan Djumpai, meskipun Mardani maupun Djumpai telah mengakui bahwa tiga hari sebelum penangkapan mereka, Mardani telah memberi tahu Djumpai bahwa ia mengetahui bahwa Djumpai sedang dicari polisi. Alasan pengadilan yaitu bahwa Djumpai lah yang mengajak Mardani untuk pergi bersamanya, bukan sebaliknya.

dapat bekerja dibawah pengawasan ketat, dan secara berangsur-angsur siap untuk kembali hidup ditengah masyarakat. Hendaknya dipastikan bahwa anggota masyarakat yang disertai tanggung jawab untuk memelihara tahanan di waktu siang, bukanlah orang yang bersimpati pada aksi kekerasan.

Agar program semacam ini dapat berhasil, beberapa faktor perlu diperhatikan:

- Pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang dirasa perlu oleh tahanan, dan sesuai dengan pasaran kerja di daerah setempat. Banyak dari pasukan Muslim yang tadinya bertempur, hidup dari berdagang kecil-kecilan. Yang mana keuntungan dari pekerjaan semacam ini yaitu hanya membutuhkan modal awal yang kecil, namun memberikan mobilitas yang tinggi dan kemandirian. Hukuman ringan yang diterima oleh banyak pelaku kekerasan di wilayah konflik berarti mudah bagi mereka untuk kembali ke pekerjaan lama mereka setelah mereka bebas, karena mereka tidak berada di dalam penjara terlalu lama sehingga kehilangan ketrampilan atau kontak mereka.<sup>94</sup> Untuk orang-orang semacam ini, pilihan lain bagi mereka harus sekurang-kurangnya sama menariknya dengan pekerjaan dagang mereka;
- Program sebaiknya dilakukan oleh Organisasi non Pemerintah atau LSM, karena peserta program yang tadinya tertarik untuk ikut, mungkin tidak jadi bergabung jika mereka melihat program ini dijalankan oleh sistem yang sama yang juga memenjarakan mereka.<sup>95</sup> Dalam memilih instruktur harus diperhatikan secara teliti, sehingga mereka yang mengawasi para tahanan bukan orang-orang yang aktif maupun secara diam-diam mendukung kegiatan jihad;
- Program sebaiknya bertujuan untuk memberikan kenalan dari golongan masyarakat yang berbeda bagi peserta program. Kesempatan untuk memperkenalkan para tahanan yang telah dibebaskan kepada kalangan yang berbeda dari kalangan yang mereka kenal sebelum mereka ditangkap, hampir lebih penting dari pelatihan itu sendiri. Bukan berarti tujuan pelatihan ini untuk mengganti kalangan yang mereka kenal

sebelumnya, atau memutuskan hubungan peserta pelatihan dari teman-teman lama mereka, karena ikatan yang terbentuk lewat masjid setempat, hubungan dagang, keluarga, tetangga, dan organisasi Islam lebih dalam dari apapun yang mungkin dapat diberikan oleh sebuah program pelatihan. Tetapi tujuan yang ingin dicapai yaitu membangun koneksi baru untuk mengurangi kesempatan bagi tahanan yang dibebaskan untuk melakukan atau mendukung tindak kekerasan;

- Meskipun menyesuaikan ketrampilan dengan jenis pekerjaan yang sedang dibutuhkan adalah hal yang penting, tetapi sebaiknya hal itu tidak dilakukan terlalu jauh, misalnya: tidak akan membantu mengurangi kekerasan jika preman yang berubah menjadi mujahid diarahkan ke pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan lama mereka sebagai preman, seperti satpam atau petugas keamanan swasta misalnya, dan
- Untuk menguatkan dan memelihara kenalan baru, sebuah program paska-pembebasan sebaiknya disusun untuk melanjutkan setiap pelatihan atau pekerjaan yang diberikan selama masa proses asimilasi.<sup>96</sup>

Sebuah program reintegrasi yang bertalian dengan program asimilasi Lembaga Pemasarakatan akan dapat berjalan dengan sangat baik bagi para tahanan yang di penjara di dekat rumah mereka. Untuk tahanan yang dipenjarakan di lokasi yang jauh dari rumah mereka, sebuah komponen paska bebas dari penjara harus tetap dapat menjangkau mereka pada saat mereka kembali ke desa mereka. Contohnya, seseorang yang berasal dari Poso ditahan di ibukota propinsi Palu (yang jaraknya kurang lebih 300 km), mungkin dapat menerima pelatihan niaga selama tahap asimilasi, kemudian dibantu untuk bergabung dengan sebuah koperasi di Poso setelah kembali ke desanya. Beberapa LSM telah berhasil menarik mantan kombatan (tidak semuanya bekas tahanan) untuk bergabung dalam program pembangunan atau advokasi yang mereka jalankan di kampung halaman mantan kombatan. Hal ini memberikan pendapatan, status, dan pengalaman bekerja di bidang lain bagi para

<sup>94</sup> Hal ini sangat berbeda dengan Irlandia Utara contohnya, dimana banyak tahanan yang dipenjara untuk waktu yang cukup lama. Untuk diskusi mengenai masalah yang timbul disana, lihat Brian Gormally, "Conversion from War to Peace: reintegration of Ex-Prisoners in Northern Ireland", BICC, Bonn, 2001, hal. 20.

<sup>95</sup> Tracy Irwin, "Prison Education in Northern Ireland: Learning from our Paramilitary Past", *The Howard Journal* 42 (5) Desember 2003, hal. 476.

<sup>96</sup> Evaluasi mengenai program reintegrasi untuk para tahanan juga menekankan pentingnya keberlanjutan antara selesainya masa pelatihan dengan kesempatan untuk menerapkan ketrampilan yang diperoleh dari pelatihan – yaitu, dengan tidak memberikan pelatihan ketrampilan bagi para tahanan yang masih akan lama meringkuk dalam penjara. Dan hal ini kurang relevan dengan keadaan di Maluku dan Poso, dimana tahanan umumnya menerima hukuman singkat. Untuk contoh kasus yang pertama, lihat Lukas Muntingh, *After Prison: The Case for Offender Reintegration (Setelah keluar dari Penjara: Kasus masalah Reintegrasi Para Napi)*, Institute for Security Studies, Maret 2001, Bagian 3.

mantan kombatan, dan pada saat yang sama LSM juga mendapat manfaat dari pengaruh dan jaringan mereka.

Program reintegrasi yang tidak berhubungan dengan Lembaga Pemasyarakatan juga patut dijajaki. Tetapi hal ini akan lebih sulit untuk mengidentifikasi peserta program dan mengawasi pelatihan. Juga patut dicatat bahwa bahkan sebuah program yang disusun dengan sangat baik tidak akan mencegah beberapa peserta training untuk menerima tawaran dari jaringan lama mereka untuk terlibat dalam tindak kekerasan baru. Keberhasilan harus diukur dari sejauh mana program ini berhasil membengkokkan jaringan ini, bukan menghapuskan seluruh jaringan ini.

Salah satu masalah yang nyata yaitu akan sulit bagi para donor untuk mendanai program apapun yang disusun untuk menguntungkan mereka yang menjadi tersangka, maupun divonis terlibat dalam terorisme. Namun upaya rehabilitasi dan reintegrasi dalam beberapa kasus mungkin dapat menjadi penangkal teror – dan yang lebih penting, merupakan sebuah strategi penting bagi pemecahan masalah konflik untuk jangka panjang.

## VI. KESIMPULAN

Enam tahun setelah konflik pecah di Maluku dan Poso, jaringan mujahidin yang terbentuk disana masih menimbulkan gangguan keamanan, meskipun pertikaian antar agama telah lama berhenti. Anggota dari jaringan-jaringan ini kebanyakan adalah anak muda berusia duapuluh-an atau tigapuluh-an, dan banyak dari mereka yang bermobilitas tinggi dan keras karena ditempa melalui pengalaman di medan tempur. Kegagalan untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan kembali para bekas mujahidin; menyediakan tempat tinggal bagi para pengungsi dan memberikan ganti rugi dan bantuan lain seperti yang telah dijanjikan; dan menuntut secara hukum para pelaku dan pemberi dana tindak kekerasan di masa lalu dengan seberat-beratnya, telah menyuburkan kegiatan para jaringan ini yang masih terus berlangsung.

Anggota dari para jaringan ini memiliki beberapa ciri yang sama:

- ❑ Mereka mungkin tidak menjalani latihan tempur yang sekeras para mujahidin Indonesia jalani di Afghanistan pada akhir tahun 1980 dan awal tahun 1990, tetapi mereka memiliki pengalaman “di medan tempur” yang lebih banyak, dan karena itu lebih cenderung dimotivasi oleh balas dendam atau hasrat untuk melanjutkan jihad dari pada ideologi apapun;
- ❑ Mereka dapat menggunakan senjata api maupun bom;
- ❑ Mereka tampaknya lebih melihat sesama warga Indonesia; khususnya kaum Kristen, daripada orang asing sebagai musuh mereka. Bagi sebagian besar dari mereka, jihad mereka adalah lokal, dan secara keseluruhan jaringan mereka mungkin tidak memiliki koneksi dengan Timur Tengah maupun Asia Tenggara sebanyak yang dimiliki generasi kelompok mujahidin di Indonesia yang sebelumnya;
- ❑ Beberapa dari mereka pernah mengikuti latihan tempur di Filipina dan/atau tahu mengenai rute perjalanan maupun jaringan perdagangan disana, termasuk jaringan perdagangan senjata;
- ❑ Mereka mungkin lebih terbiasa untuk bekerja sama dengan anggota geng, atau mungkin memang sebelumnya mereka adalah anggota geng, sehingga mengaburkan batas antara aksi kekerasan kelompok mujahidin dan tindak kejahatan biasa; dan
- ❑ Para mujahidin yang pernah bertempur di Poso sering mengembangkan kontak mereka di Ambon, dan sebaliknya.

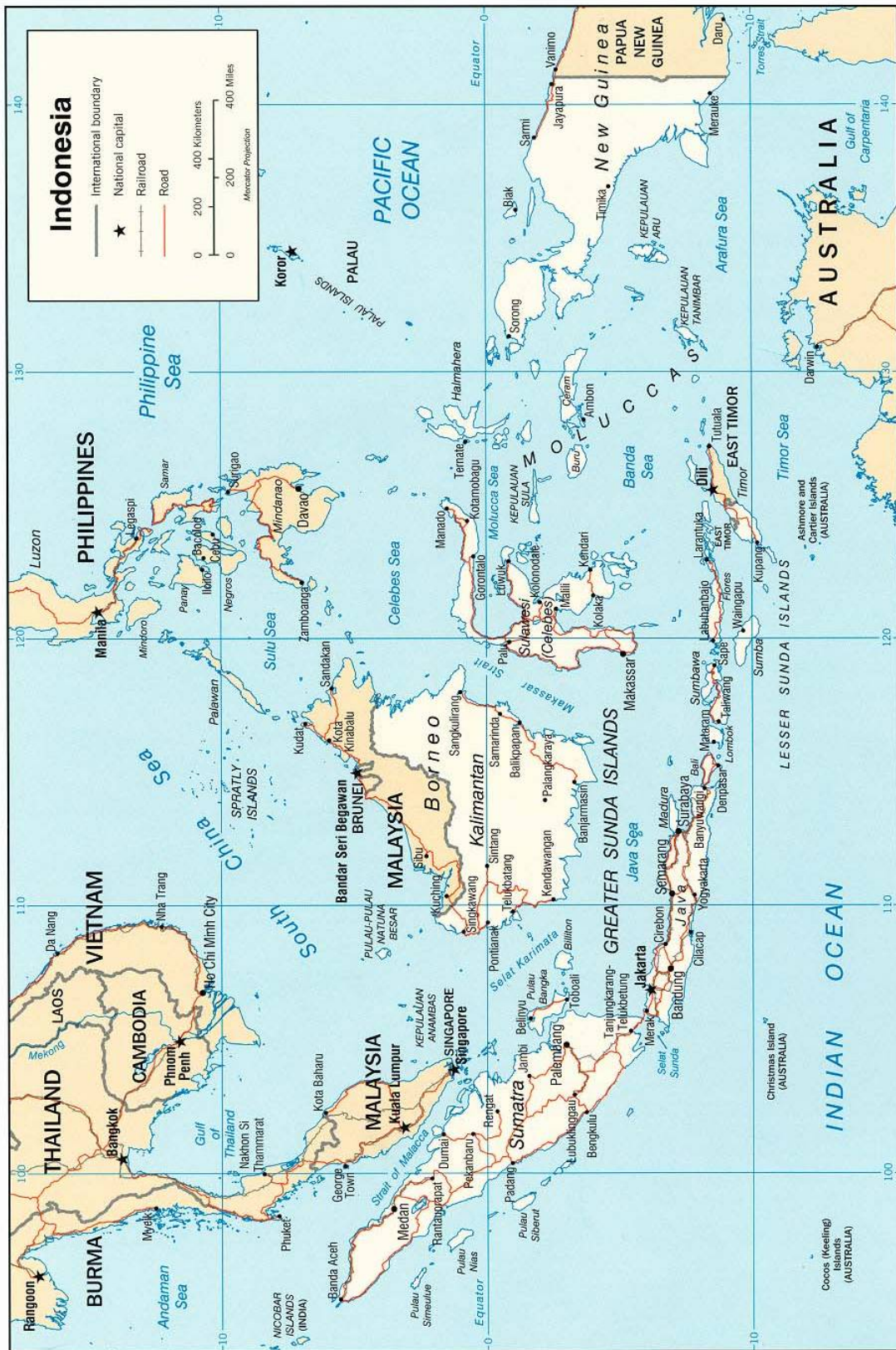
Jaringan tersebut jelas-jelas merentang luas hingga keluar Maluku dan Poso, tetapi kunci untuk melemahkan jaringan ini mungkin terletak pada upaya untuk membatasi kemampuan mereka untuk bergerak/beroperasi di kedua wilayah konflik. Sasaran kunci untuk upaya ini yaitu mungkin para mujahidin setempat, orang-orang yang sering disebut oleh para perekrut mereka yang berbasis di Jawa sebagai “mujahidin situasional” – yaitu pasukan tempur yang timbul karena keadaan. Latihan agama bagi mereka sangat singkat dan ad hoc (disusun secara khusus), dan oleh karenanya, lebih kecil kemungkinannya mereka ideologis. Meskipun mereka mungkin rentan terhadap pendekatan dari para pelaku kejahatan, koruptor, dan pimpinan geng, tetapi mereka mungkin merupakan kelompok yang paling efektif untuk diterapkan program reintegrasi.

Memperlemah jaringan-jaringan ini tidak akan menjamin berakhirnya aksi-aksi kekerasan di daerah konflik, maupun menghentikan terorisme di daerah lain di Indonesia, tetapi dapat memberikan sumbangan yang sangat penting bagi kedua tujuan tersebut.

**Jakarta/Brussels, 13 Oktober 2005**

## APPENDIX A

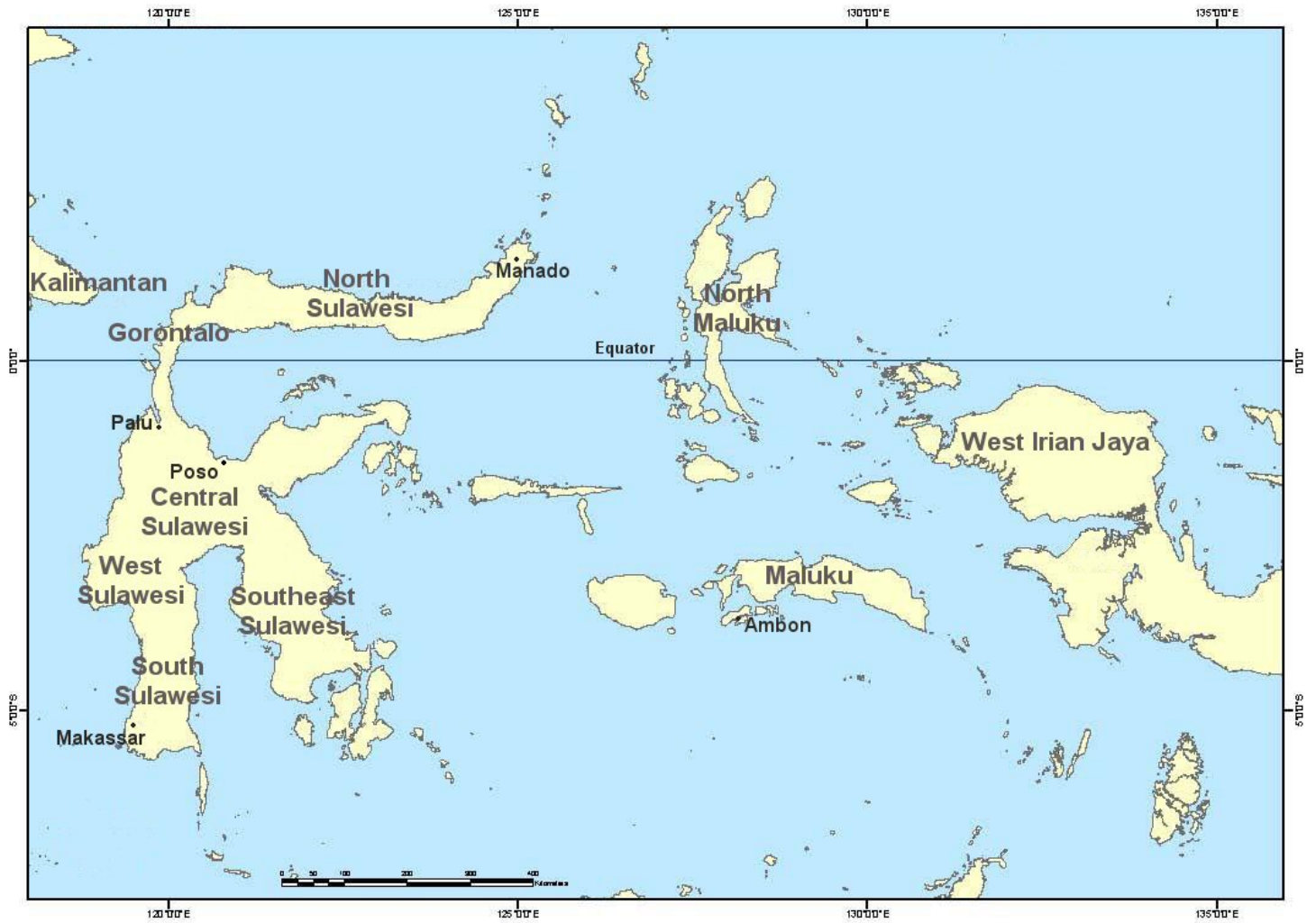
### PETA INDONESIA



Courtesy of The General Libraries, The University of Texas at Austin

## APPENDIX B

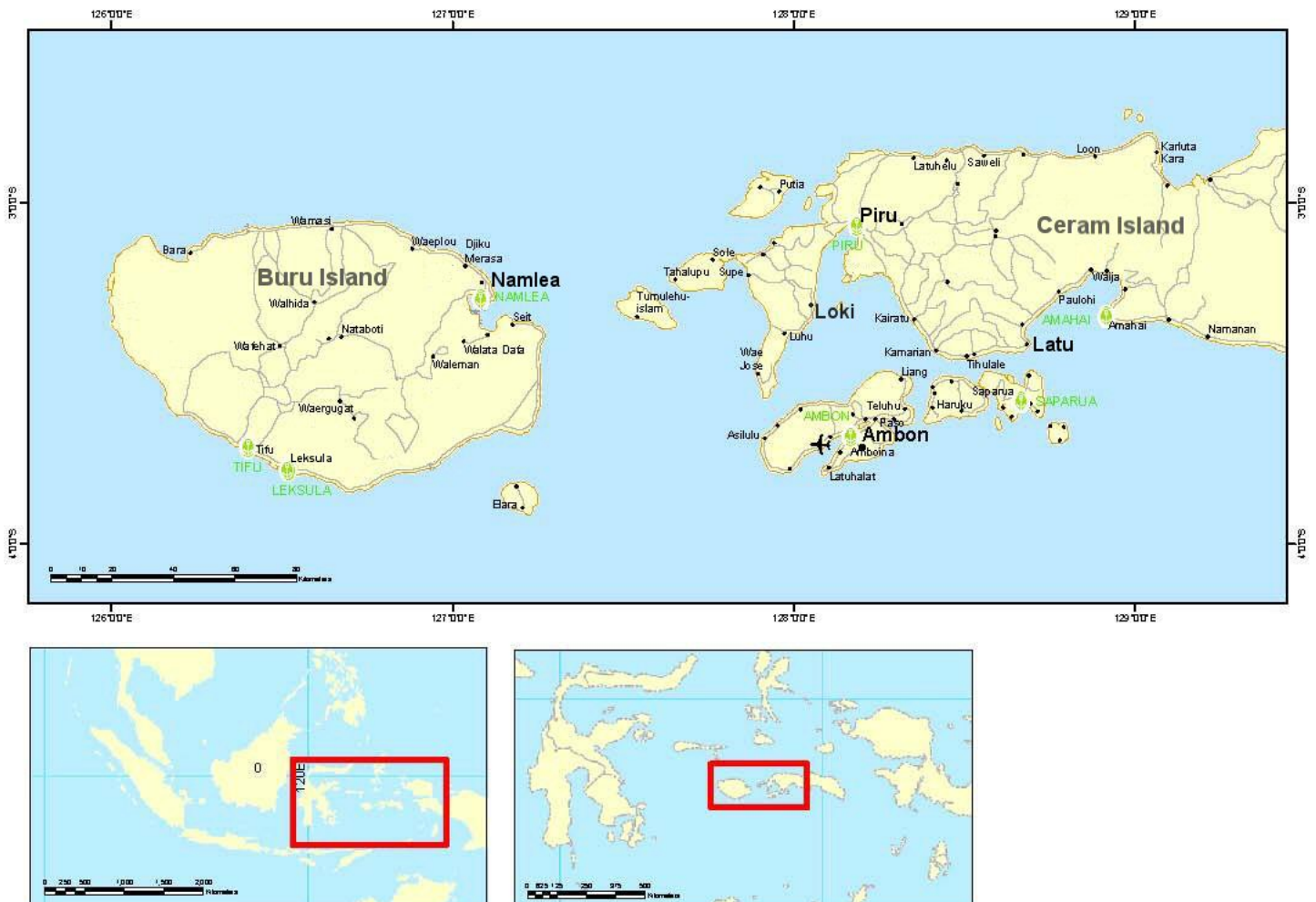
### PETA INDONESIA TIMUR





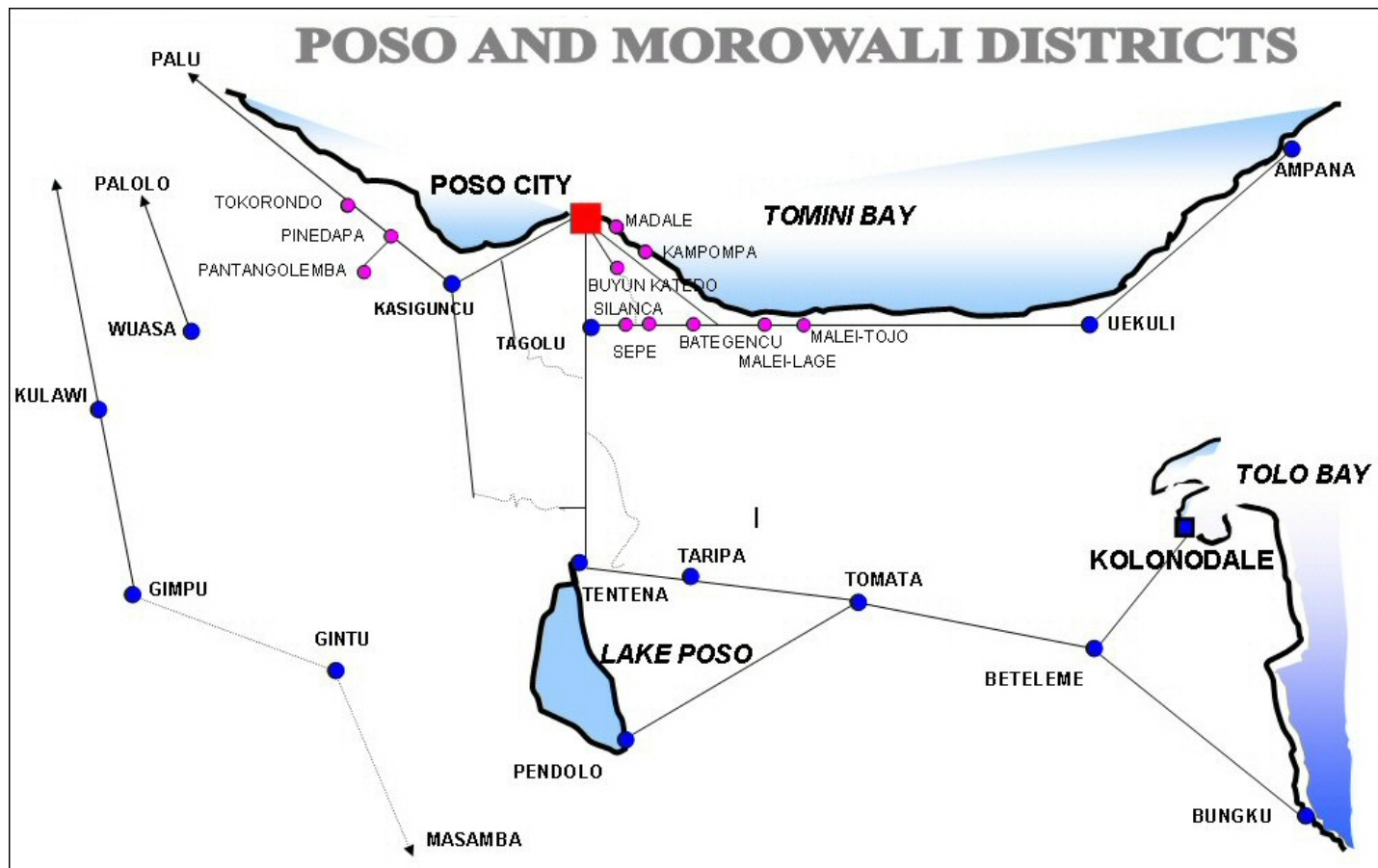
## APPENDIX C

### PETA MALUKU



APPENDIX D

PETA KABUPATEN POSO



## APPENDIX E

### KEKERASAN DI POSO DAN MALUKU, 2004-2005

#### POSO<sup>97</sup>

**1 January 2004**, Bomb explodes at 19:15 near Kasiguncu airstrip, Poso Pesisir, no casualties.

**6 March 2004**, Sugianto Kaimudin beaten by two men who attempted to stop his motorbike on road from Tojo Barat to Poso town.

**27 March 2004**, Jhon Christian Tanalida, Kawua resident, shot dead in his field near the city suburb of Sayo at 17:00.

**30 March 2004**, The dean of the Law Faculty of Poso's Sintuwu Maroso University (Unsimar), Rosy Tilongo SH, shot in the head while on campus.

**30 March 2004**, Rev Perdi shot fatally in the chest after answering the knock of his two assailants on the door of his church in Membuke hamlet, Tumora, Poso Pesisir.

**10 April 2004**, Tabernakel church in Maranda hamlet, Kilo Trans village, Poso Pesisir fired upon. Seven injured.

**26 May 2004**, Central Sulawesi prosecutor Ferry Silalahi shot dead shortly after leaving a prayer session at the house of Palu lawyer Thomas Ihalauw. Several cases Silalahi had handled could have been connected to his death: the day before his murder, several JI suspects were held in detention despite winning their appeal to the Central Sulawesi High Court. Ferry had also handled drugs cases in Tangerang before being moved to Central Sulawesi.

**16 July 2004**, Motorcycle cab driver from Gebangrejo, Poso Kota, Melki, hacked to death by Yonatan M Canda, who asked Melki to drive him south of the city to Pandiri.

**17 July 2004**, Sudisman Mobinta shot in Betania, Poso Kota, while climbing tree to retrieve sager (traditional alcoholic drink).

**17 July 2004**, Helmi Tombiling stabbed to death at 21:00 at her petrol stand in Kawua, Poso city by a motorcyclist who had stopped purportedly to buy petrol.

**17 July 2004**, A small bomb explodes in Kasintuwu, Poso Kota, no victims.

**18 July 2004**, Rev. Susianty Tinulele fatally shot while leading a church service in Effatha church, Palu. Four members of congregation suffer gunshot wounds.

**28 July 2004**, Police team led by Ricky Naldo, who as of mid-2005 had become Poso Deputy Police Chief, shoot Bambang, whom they suspect is perpetrator of Susianty Tinulele shooting in Lore Selatan. Bambang later released after police admit a case of mistaken identity.

**13 October 2004**, Shots fired at houses in Mauru hamlet, Kawende village, Poso Pesisir. One dead, three wounded. Gunmen flee in motor boat towards Poso city.

**17 October 2004**, Bomb explodes in yard of house in JI Pulau Morotai, Poso Kota. No victims.

**21 October 2004**, Gunman on motorbike fired shots at people gathered in front of Bethani church, Poso Kota. Hans Lanipi suffered gunshot wound to back. Andi Makassau arrested but not charged for the shooting.

**4 November 2004**, Carminalis Ndele, village head of Pinedapa village, Poso Pesisir sub-district, found beheaded after leaving his house with a man resembling Ahmad Laparigi. Ndele's head was dumped in a bag in the city suburb of Sayo, his body was found near Pinedapa. Ahmad Laparigi arrested in connection with the murder but not charged.

**6 November 2004**, A bomb explodes in Lembomawo, Poso Kota. No victims.

**8 November 2004**, Imbo shot fatally at close range by a gunman on a motorbike in city suburb of Bonesompe while driving public transport vehicle on Tentena-Madale route. Poso District Military Commander Lieutenant Colonel Ray Gunawan commented that the attack appeared to be planned, as Imbo was shot on the return journey from Tentena after a person hiding behind bushes had called out that he had just gone past.

**11 November 2004**, Three youths climbing a mango tree in Bonesompe, Poso Kota, fire at tree's owner, who was not wounded.

**13 November 2004**, Bomb placed in public transport vehicle parked at Poso central market. Six people killed, three at scene, two seriously injured. Those killed mainly from majority-Christian Sepe-Silanca village.

**12 December 2004**, Attacks on Imanuel and Anugerah churches in Palu. Immanuel church bombed (one injured), Anugerah church fired on (two wounded). Following the attacks, Palu City Police Chief Noman Siswandi and South

<sup>97</sup> Informasi didapat dari sumber berikut ini: LPS-HAM Sulteng, Matriks Kekerasan Tahun 2004, Palu, 2004; Arianto Sangaji, "Peredaran Ilegal Senjata Api di Sulawesi Tengah", Position paper no. 4, YTM and LPMS, Palu, 2005; e-mail list servers, sumber media lokal, wawancara Crisis Group.

Palu Police Chief Sumantri Sudirman removed from their posts.

**24 December 2004**, Rev. Jembris Tamabalino and Joni Tegel attacked by five men wielding knives on the road between Masani and Saatu villages, Poso Pesisir. Police arrested a man from neighbouring Tokorondo village after the attack.

**27 December 2004**, Bomb explodes in Sayo, Poso Kota. No victims.

**29 December 2004**, Bomb explodes in Kawua, Poso Kota. No victims.

**31 December, 1 January 2005**, Small bombs explode almost simultaneously at several locations in Poso city shortly after midnight. No one injured.

**3 January 2005**, Small bomb explodes near Hotel Alamanda, Poso city, which Brimob from Jakarta were using as barracks. No victims.

**7 January 2005**, Bomb explodes in empty house in Moengko Lama, Poso Kota. No victims.

**1 April 2005**, Armed robbery of payroll at Poso bupati office of Rp. 583 million (\$58,000). Local man Tukiran on trial.

**28 April 2005**, Two bombs explode at NGO offices in Poso: First at Pusat Rekonsiliasi Konflik dan Perdamaian Poso (Centre for Conflict Resolution and Peace in Poso, PRKP), and then fifteen minutes later at Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil (Institute for the Strengthening of Civil Society, LPMS). No injuries, damage caused to front of LPMS office.

**28 May 2005**, Two bombs explode in Tentena market, fifteen minutes apart. First bomb in market stall, second in front of BRI near market. 22 killed, approximately 70 injured.

**28 June 2005**, Bomb explodes in front of Kasintuwu, Poso Kota campaign office of Piet Inkiriwang and Thalib Rimi, candidates in Poso district head election. No injuries.

**29 June 2005**, Small bomb explodes in front of Poso Central Market. No victims.

**3 August 2005**, Budiyanto (26) shot dead at 20:30 in city suburb of Gebangrejo while eating with wife and child.

**4 August 2005**, Sugito (48) shot dead by assailant using 38 calibre weapon in Gebangrejo while walking to prayer-house to perform the morning prayer. Location of shooting was only 100 metres from site where Budiyanto was murdered the previous night.

**17 September 2005**, Bomb explodes at party in city suburb of Bonesompe, four injured.

**29 September 2005**, Hasrin Latorape (42) shot fatally in face and arm in Toini village, Poso Pesisir, at approximately 17:20. Police suspect Latorape was shot because he was a witness to other recent violence.

**4 October 2005**, Milton Tadoa (51) fatally shot while riding motorbike towards Pantangolemba village, Poso Pesisir sub-district office, where he lived. Tadoa was treasurer of the sub-district office and had just withdrawn approximately Rp. 54 million (\$5400) to pay civil servants' wages. Robbery is the suspected motive.

## MALUKU<sup>98</sup>

**5 May 2004**, Gunmen attack Wamkana village, Buru Selatan. Three killed (Arnold Latua, Afi Nurlaka, Obet Lesusa), four injured.

**23 May 2004**, Bomb explodes at 09:00 across road from Seventh Day Adventist church in Halong village, Ambon. Second bomb explodes half an hour later in Ambon city suburb of Batumerah. In all, five injured: Yodi Mataheru (critically), Ranel Manuputty, Isak Manuputty, Chris Wattimena, Marselo Manusiwa.

**25 May 2004**, Bomb explodes at 10:30 in Batu Meja Market, Ambon. One killed. Three other unexploded bombs discovered in separate locations. Suspected perpetrators: Mato alias Tohar alias Metro.

**15 June 2004**, Police arrested Rizky, carrying identity cards from both Palu and Ambon, after a shot was fired while security forces and residents were dismantling a street barricade on the border of Wainitu-Talake, Ambon city.

**8 August 2004**, Brimob BKO Resimen II Pelopor shoots a wanted man, Remon Kaya, but also hits a nine-year-old child, Henry Pentury. Remon charged with illegal weapons possession.

**16 November 2004**, Amir Latuconsina shot in arm in early morning at Tulehu port by assailants who arrived on two speedboats, Latuconsina was waiting for passengers for his speedboat to Haruku island.

**24 or 25 November 2004**, T Tanase, a resident of Leahoni village, found shot dead 100 metres from Waesoan village, South Buru.

**2 December 2004**, Jokran Hardiratu, minister at Pentakosta Church in Lahuban sub-village, Elfule village, Namrole sub-district, Buru district abducted late at night by several masked men. Jokran's church had received Rp. 10 million (\$1,000) in assistance from the province government

---

<sup>98</sup> Informasi didapat dari Jacky Manuputty, "Mungkinkah Merebak Lagi Konflik Baru", nd, sumber media lokal, wawancara Crisis Group.

shortly before, and the abductors stole Jokran's bank books before discarding them.

**2 December 2004**, Ismael Wael, resident of Wakal village, Ambon, stabbed to death, three injured and one house burned during a fight at a wedding. The following night Wakal residents attacked Mamua sub-village, burning seventeen houses and damaging others.

**3 February 2005**, Bomb exploded at shop in city suburb of Batumerah, Ambon.

**4 February 2005**, Two homemade bombs explode on vacant lot in Benteng Atas, Ambon.

**7 February 2005**, Gunmen using speedboat fire at Lai-Lai 7 ferry in waters off South Buru. Two passengers wounded: F. Lasamahu, Daud Yarenmase. Perpetrators flee when a Field Artillery (Artilleri Medan, referred to as *Armed*) Company Commander on board returns fire.

**6 February 2005**, Ismael Pelu shot dead by off-duty policeman at Waitatiri, Ambon. Some reports maintain Pelu was killed when a group of returning haji was fired upon. However, victim was far away from the group when shot.

**15 February 2005**, Gunmen using a speedboat fire on Villa Karaoke in Hative Besar. Two killed (Siti Ratnawati and Jondri Puturuhi), one wounded (James Tanisiwa). Attack may have been linked to shooting of Ismael Pelu, as several of those apprehended by police were family members.

**27 February 2005**, Fake bomb placed in Halong Baru village, Kota Ambon.

**5 March 2005**, Two assailants on motorbike lob grenade at motorcycle taxi post late at night in Lateri village, Ambon. Three injured (Simon Tusmain, Audi Mindje, Julius Moses).

**11 March 2005**, Explosions heard in Tanah Lapang Kecil (Talake) and Mardika, Ambon city, around 23:30.

**12, 13 March 2005**, Explosions heard late at night on border of Mardika and Batumerah suburbs in Ambon city, where conflict started in 1999.

**17 March 2005**, Christian motorcycle taxi driver, Paulus Wemay (28), found murdered in Tulehu. Murdered by Christian (arrested), but body discarded on public street in Muslim area.

**21 March 2005**, Grenade injures five people in Ambon city suburb of Batumerah at 20:30; fourteen passengers of an Ambon-Passo local transport minivan then injured when villagers pelted the van which they suspected had been the source of the grenade. In fact, two men on a motorbike threw the grenade into the van, after which passengers kicked it out of the van. Suspected perpetrators: Abdullah Umamit, Cholid.

**22 March 2005**, Explosion at 02:00 in Urimesing, Kota Ambon. No casualties.

**25 March 2005**, School in Galunggung, Batumerah, fired on, breaking glass but causing no casualties.

**12 April 2005**, Bomb explodes at intersection in Pohon Puleh, Kota Ambon, at around 00:45. Two motorcycle taxi drivers who were at the scene were arrested but later released.

**16 May 2005**, Attack on Brimob post in Loki village, West Ceram. Five Brimob members and local cook killed, one attacker (Ikhlis) also killed.

**20 May 2005**, Residents of Arma and Watmuri villages in Southeast Maluku clash over sea border between two villages, three killed, 51 injured.

**25 August 2005**, Package given to pedicab driver to take to Mardika market in Ambon city explodes after driver noticed smell of sulphur, seven injured.

## APPENDIX F

### ABOUT THE INTERNATIONAL CRISIS GROUP

The International Crisis Group (Crisis Group) is an independent, non-profit, non-governmental organisation, with over 110 staff members on five continents, working through field-based analysis and high-level advocacy to prevent and resolve deadly conflict.

Crisis Group's approach is grounded in field research. Teams of political analysts are located within or close by countries at risk of outbreak, escalation or recurrence of violent conflict. Based on information and assessments from the field, it produces analytical reports containing practical recommendations targeted at key international decision-takers. Crisis Group also publishes *CrisisWatch*, a twelve-page monthly bulletin, providing a succinct regular update on the state of play in all the most significant situations of conflict or potential conflict around the world.

Crisis Group's reports and briefing papers are distributed widely by email and printed copy to officials in foreign ministries and international organisations and made available simultaneously on the website, [www.crisisgroup.org](http://www.crisisgroup.org). Crisis Group works closely with governments and those who influence them, including the media, to highlight its crisis analyses and to generate support for its policy prescriptions.

The Crisis Group Board -- which includes prominent figures from the fields of politics, diplomacy, business and the media -- is directly involved in helping to bring the reports and recommendations to the attention of senior policy-makers around the world. Crisis Group is chaired by Lord Patten of Barnes, former European Commissioner for External Relations. President and Chief Executive since January 2000 is former Australian Foreign Minister Gareth Evans.

Crisis Group's international headquarters are in Brussels, with advocacy offices in Washington DC (where it is based as a legal entity), New York, London and Moscow. The organisation currently operates fifteen field offices (in Amman, Belgrade, Bishkek, Dakar, Dushanbe, Islamabad, Jakarta, Kabul, Nairobi, Pretoria, Pristina, Quito, Seoul, Skopje and Tbilisi), with analysts working in over 50 crisis-affected countries and territories across four continents. In Africa, this includes Angola, Burundi, Côte d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Eritrea, Ethiopia, Guinea, Liberia, Rwanda, the Sahel region, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Uganda and Zimbabwe; in Asia, Afghanistan, Indonesia, Kashmir, Kazakhstan,

Kyrgyzstan, Myanmar/Burma, Nepal, North Korea, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan; in Europe, Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Kosovo, Macedonia, Moldova, Montenegro and Serbia; in the Middle East, the whole region from North Africa to Iran; and in Latin America, Colombia, the Andean region and Haiti.

Crisis Group raises funds from governments, charitable foundations, companies and individual donors. The following governmental departments and agencies currently provide funding: Agence Intergouvernementale de la francophonie, Australian Agency for International Development, Austrian Federal Ministry of Foreign Affairs, Belgian Ministry of Foreign Affairs, Canadian Department of Foreign Affairs and International Trade, Canadian International Development Agency, Canadian International Development Research Centre, Czech Ministry of Foreign Affairs, Dutch Ministry of Foreign Affairs, Finnish Ministry of Foreign Affairs, French Ministry of Foreign Affairs, German Foreign Office, Irish Department of Foreign Affairs, Japanese International Cooperation Agency, Principality of Liechtenstein Ministry of Foreign Affairs, Luxembourg Ministry of Foreign Affairs, New Zealand Agency for International Development, Republic of China (Taiwan) Ministry of Foreign Affairs, Royal Danish Ministry of Foreign Affairs, Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Swedish Ministry for Foreign Affairs, Swiss Federal Department of Foreign Affairs, Turkish Ministry of Foreign Affairs, United Kingdom Foreign and Commonwealth Office, United Kingdom Department for International Development, U.S. Agency for International Development.

Foundation and private sector donors include Atlantic Philanthropies, Carnegie Corporation of New York, Compton Foundation, Ford Foundation, Fundação Oriente, Fundación DARA Internacional, Bill & Melinda Gates Foundation, William & Flora Hewlett Foundation, Hunt Alternatives Fund, Korea Foundation, John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, Moriah Fund, Charles Stewart Mott Foundation, Open Society Institute, Pierre and Pamela Omidyar Fund, David and Lucile Packard Foundation, Ploughshares Fund, Sigrid Rausing Trust, Rockefeller Foundation, Rockefeller Philanthropy Advisors and Sarlo Foundation of the Jewish Community Endowment Fund.

**October 2005**

## APPENDIX G

### CRISIS GROUP REPORTS AND BRIEFINGS ON ASIA SINCE 2002

#### CENTRAL ASIA

*The IMU and the Hizb-ut-Tahrir: Implications of the Afghanistan Campaign*, Asia Briefing N°11, 30 January 2002 (also available in Russian)

*Central Asia: Border Disputes and Conflict Potential*, Asia Report N°33, 4 April 2002

*Central Asia: Water and Conflict*, Asia Report N°34, 30 May 2002

*Kyrgyzstan's Political Crisis: An Exit Strategy*, Asia Report N°37, 20 August 2002

*The OSCE in Central Asia: A New Strategy*, Asia Report N°38, 11 September 2002

*Central Asia: The Politics of Police Reform*, Asia Report N°42, 10 December 2002

*Cracks in the Marble: Turkmenistan's Failing Dictatorship*, Asia Report N°44, 17 January 2003

*Uzbekistan's Reform Program: Illusion or Reality?*, Asia Report N°46, 18 February 2003 (also available in Russian)

*Tajikistan: A Roadmap for Development*, Asia Report N°51, 24 April 2003

*Central Asia: Last Chance for Change*, Asia Briefing N°25, 29 April 2003

*Radical Islam in Central Asia: Responding to Hizb ut-Tahrir*, Asia Report N°58, 30 June 2003

*Central Asia: Islam and the State*, Asia Report N°59, 10 July 2003

*Youth in Central Asia: Losing the New Generation*, Asia Report N°66, 31 October 2003

*Is Radical Islam Inevitable in Central Asia? Priorities for Engagement*, Asia Report N°72, 22 December 2003

*The Failure of Reform in Uzbekistan: Ways Forward for the International Community*, Asia Report N°76, 11 March 2004

*Tajikistan's Politics: Confrontation or Consolidation?*, Asia Briefing N°33, 19 May 2004

*Political Transition in Kyrgyzstan: Problems and Prospects*, Asia Report N°81, 11 August 2004

*Repression and Regression in Turkmenistan: A New International Strategy*, Asia Report N°85, 4 November 2004 (also available in Russian)

*The Curse of Cotton: Central Asia's Destructive Monoculture*, Asia Report N°93, 28 February 2005 (also available in Russian)

*Kyrgyzstan: After the Revolution*, Asia Report N°97, 4 May 2005 (also available in Russian)

*Uzbekistan: The Andijon Uprising*, Asia Briefing N°38, 25 May 2005 (also available in Russian)

#### NORTH EAST ASIA

*Taiwan Strait I: What's Left of "One China"?*, Asia Report N°53, 6 June 2003

*Taiwan Strait II: The Risk of War*, Asia Report N°54, 6 June 2003

*Taiwan Strait III: The Chance of Peace*, Asia Report N°55, 6 June 2003

*North Korea: A Phased Negotiation Strategy*, Asia Report N°61, 1 August 2003

*Taiwan Strait IV: How an Ultimate Political Settlement Might Look*, Asia Report N°75, 26 February 2004

*North Korea: Where Next for the Nuclear Talks?*, Asia Report N°87, 15 November 2004 (also available in Korean and in Russian)

*Korea Backgrounder: How the South Views its Brother from Another Planet*, Asia Report N°89, 14 December 2004 (also available in Korean and in Russian)

*North Korea: Can the Iron Fist Accept the Invisible Hand?*, North East Asia Report N°96, 25 April 2005 (also available in Korean and in Russian)

*Japan and North Korea: Bones of Contention*, Asia Report N°100, 27 June 2005

*China and Taiwan: Uneasy Détente*, Asia Briefing N°42, 21 September 2005

#### SOUTH ASIA

*Pakistan: The Dangers of Conventional Wisdom*, Pakistan Briefing N°12, 12 March 2002

*Securing Afghanistan: The Need for More International Action*, Afghanistan Briefing N°13, 15 March 2002

*The Loya Jirga: One Small Step Forward?* Afghanistan & Pakistan Briefing N°17, 16 May 2002

*Kashmir: Confrontation and Miscalculation*, Asia Report N°35, 11 July 2002

*Pakistan: Madrasas, Extremism and the Military*, Asia Report N°36, 29 July 2002

*The Afghan Transitional Administration: Prospects and Perils*, Afghanistan Briefing N°19, 30 July 2002

*Pakistan: Transition to Democracy?* Asia Report N°40, 3 October 2002

*Kashmir: The View From Srinagar*, Asia Report N°41, 21 November 2002

*Afghanistan: Judicial Reform and Transitional Justice*, Asia Report N°45, 28 January 2003

*Afghanistan: Women and Reconstruction*, Asia Report N°48, 14 March 2003 (also available in Dari)

*Pakistan: The Mullahs and the Military*, Asia Report N°49, 20 March 2003

*Nepal Backgrounder: Ceasefire – Soft Landing or Strategic Pause?*, Asia Report N°50, 10 April 2003

*Afghanistan's Flawed Constitutional Process*, Asia Report N°56, 12 June 2003 (also available in Dari)

*Nepal: Obstacles to Peace*, Asia Report N°57, 17 June 2003

*Afghanistan: The Problem of Pashtun Alienation*, Asia Report N°62, 5 August 2003

*Peacebuilding in Afghanistan*, Asia Report N°64, 29 September 2003

**Disarmament and Reintegration in Afghanistan**, Asia Report N°65, 30 September 2003

**Nepal: Back to the Gun**, Asia Briefing N°28, 22 October 2003

**Kashmir: The View from Islamabad**, Asia Report N°68, 4 December 2003

**Kashmir: The View from New Delhi**, Asia Report N°69, 4 December 2003

**Kashmir: Learning from the Past**, Asia Report N°70, 4 December 2003

**Afghanistan: The Constitutional Loya Jirga**, Afghanistan Briefing N°29, 12 December 2003

**Unfulfilled Promises: Pakistan's Failure to Tackle Extremism**, Asia Report N°73, 16 January 2004

**Nepal: Dangerous Plans for Village Militias**, Asia Briefing N°30, 17 February 2004 (also available in Nepali)

**Devolution in Pakistan: Reform or Regression?**, Asia Report N°77, 22 March 2004

**Elections and Security in Afghanistan**, Asia Briefing N°31, 30 March 2004

**India/Pakistan Relations and Kashmir: Steps toward Peace**, Asia Report N°79, 24 June 2004

**Pakistan: Reforming the Education Sector**, Asia Report N°84, 7 October 2004

**Building Judicial Independence in Pakistan**, Asia Report N°86, 10 November 2004

**Afghanistan: From Presidential to Parliamentary Elections**, Asia Report N°88, 23 November 2004

**Nepal's Royal Coup: Making a Bad Situation Worse**, Asia Report N°91, 9 February 2005

**Afghanistan: Getting Disarmament Back on Track**, Asia Briefing N°35, 23 February 2005

**Nepal: Responding to the Royal Coup**, Asia Briefing N°35, 24 February 2005

**Nepal: Dealing with a Human Rights Crisis**, Asia Report N°94, 24 March 2005

**The State of Sectarianism in Pakistan**, Asia Report N°95, 18 April 2005

**Political Parties in Afghanistan**, Asia Briefing N°39, 2 June 2005

**Towards a Lasting Peace in Nepal: The Constitutional Issues**, Asia Report N°99, 15 June 2005

**Afghanistan Elections: Endgame or New Beginning?**, Asia Report N°101, 21 July 2005

**Nepal: Beyond Royal Rule**, Asia Briefing N°41, 15 September 2005

**Authoritarianism and Political Party Reform in Pakistan**, Asia Report N°102, 28 September 2005

## SOUTH EAST ASIA

**Indonesia: The Search for Peace in Maluku**, Asia Report N°31, 8 February 2002

**Aceh: Slim Chance for Peace**, Indonesia Briefing, 27 March 2002

**Myanmar: The Politics of Humanitarian Aid**, Asia Report N°32, 2 April 2002

**Myanmar: The HIV/AIDS Crisis**, Myanmar Briefing N°15, 2 April 2002

**Indonesia: The Implications of the Timor Trials**, Indonesia Briefing N°16, 8 May 2002

**Resuming U.S.-Indonesia Military Ties**, Indonesia Briefing N°18, 21 May 2002

**Al-Qaeda in Southeast Asia: The case of the "Ngruki Network" in Indonesia**, Indonesia Briefing N°20, 8 August 2002

**Indonesia: Resources and Conflict in Papua**, Asia Report N°39, 13 September 2002

**Myanmar: The Future of the Armed Forces**, Asia Briefing N°21, 27 September 2002

**Tensions on Flores: Local Symptoms of National Problems**, Indonesia Briefing N°22, 10 October 2002

**Impact of the Bali Bombings**, Indonesia Briefing N°23, 24 October 2002

**Indonesia Backgrounder: How the Jemaah Islamiyah Terrorist Network Operates**, Asia Report N°43, 11 December 2002

**Aceh: A Fragile Peace**, Asia Report N°47, 27 February 2003 (also available in Indonesian)

**Dividing Papua: How Not to Do It**, Asia Briefing N°24, 9 April 2003

**Myanmar Backgrounder: Ethnic Minority Politics**, Asia Report N°52, 7 May 2003

**Aceh: Why the Military Option Still Won't Work**, Indonesia Briefing N°26, 9 May 2003 (also available in Indonesian)

**Indonesia: Managing Decentralisation and Conflict in South Sulawesi**, Asia Report N°60, 18 July 2003

**Aceh: How Not to Win Hearts and Minds**, Indonesia Briefing N°27, 23 July 2003

**Jemaah Islamiyah in South East Asia: Damaged but Still Dangerous**, Asia Report N°63, 26 August 2003

**The Perils of Private Security in Indonesia: Guards and Militias on Bali and Lombok**, Asia Report N°67, 7 November 2003

**Indonesia Backgrounder: A Guide to the 2004 Elections**, Asia Report N°71, 18 December 2003

**Indonesia Backgrounder: Jihad in Central Sulawesi**, Asia Report N°74, 3 February 2004

**Myanmar: Sanctions, Engagement or Another Way Forward?**, Asia Report N°78, 26 April 2004

**Indonesia: Violence Erupts Again in Ambon**, Asia Briefing N°32, 17 May 2004

**Southern Philippines Backgrounder: Terrorism and the Peace Process**, Asia Report N°80, 13 July 2004 (also available in Bahasa)

**Myanmar: Aid to the Border Areas**, Asia Report N°82, 9 September 2004

**Indonesia Backgrounder: Why Salafism and Terrorism Mostly Don't Mix**, Asia Report N°83, 13 September 2004

**Burma/Myanmar: Update on HIV/AIDS policy**, Asia Briefing N°34, 16 December 2004

**Indonesia: Rethinking Internal Security Strategy**, Asia Report N°90, 20 December 2004

**Recycling Militants in Indonesia: Darul Islam and the Australian Embassy Bombing**, Asia Report N°92, 22 February 2005

**Decentralisation and Conflict in Indonesia: The Mamasa Case**, Asia Briefing N°37, 3 May 2005



***Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad***, Asia Report N°98,  
18 May 2005

***Aceh: A New Chance for Peace***, Asia Briefing N°40, 15 August  
2005

---

## **OTHER REPORTS AND BRIEFINGS**

---

For Crisis Group reports and briefing papers on:

- Africa
- Europe
- Latin America and Caribbean
- Middle East and North Africa
- Thematic Issues
- *CrisisWatch*

please visit our website [www.crisisgroup.org](http://www.crisisgroup.org)

## APPENDIX H

### CRISIS GROUP BOARD OF TRUSTEES

#### Chair

##### **Lord Patten of Barnes**

*Former European Commissioner for External Relations, UK*

#### President & CEO

##### **Gareth Evans**

*Former Foreign Minister of Australia*

#### Executive Committee

##### **Morton Abramowitz**

*Former U.S. Assistant Secretary of State and Ambassador to Turkey*

##### **Emma Bonino**

*Member of European Parliament; former European Commissioner*

##### **Cheryl Carolus**

*Former South African High Commissioner to the UK; former Secretary General of the ANC*

##### **Maria Livanos Cattai\***

*Former Secretary-General, International Chamber of Commerce*

##### **Yoichi Funabashi**

*Chief Diplomatic Correspondent & Columnist, The Asahi Shimbun, Japan*

##### **William Shawcross**

*Journalist and author, UK*

##### **Stephen Solarz\***

*Former U.S. Congressman*

##### **George Soros**

*Chairman, Open Society Institute*

##### **William O. Taylor**

*Chairman Emeritus, The Boston Globe, U.S.*

*\*Vice-Chair*

##### **Adnan Abu-Odeh**

*Former Political Adviser to King Abdullah II and to King Hussein; former Jordan Permanent Representative to UN*

##### **Kenneth Adelman**

*Former U.S. Ambassador and Director of the Arms Control and Disarmament Agency*

##### **Ersin Arioglu**

*Member of Parliament, Turkey; Chairman Emeritus, Yapi Merkezi Group*

##### **Diego Arria**

*Former Ambassador of Venezuela to the UN*

##### **Zbigniew Brzezinski**

*Former U.S. National Security Advisor to the President*

##### **Victor Chu**

*Chairman, First Eastern Investment Group, Hong Kong*

##### **Wesley Clark**

*Former NATO Supreme Allied Commander, Europe*

##### **Pat Cox**

*Former President of European Parliament*

##### **Ruth Dreifuss**

*Former President, Switzerland*

##### **Uffe Ellemann-Jensen**

*Former Minister of Foreign Affairs, Denmark*

##### **Mark Eyskens**

*Former Prime Minister of Belgium*

##### **Leslie H. Gelb**

*President Emeritus of Council on Foreign Relations, U.S.*

##### **Bronislaw Geremek**

*Former Minister of Foreign Affairs, Poland*

##### **I.K. Gujral**

*Former Prime Minister of India*

##### **Carla Hills**

*Former U.S. Secretary of Housing; former U.S. Trade Representative*

##### **Lena Hjelm-Wallén**

*Former Deputy Prime Minister and Foreign Affairs Minister, Sweden*

##### **James C.F. Huang**

*Deputy Secretary General to the President, Taiwan*

##### **Swanee Hunt**

*Chair of Inclusive Security: Women Waging Peace; former U.S. Ambassador to Austria*

##### **Asma Jahangir**

*UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions; former Chair Human Rights Commission of Pakistan*

##### **Shiv Vikram Khemka**

*Founder and Executive Director (Russia) of SUN Group, India*

##### **James V. Kimsey**

*Founder and Chairman Emeritus of America Online, Inc. (AOL)*

##### **Bethuel Kiplagat**

*Former Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Kenya*

##### **Wim Kok**

*Former Prime Minister, Netherlands*

##### **Trifun Kostovski**

*Member of Parliament, Macedonia; founder of Kometal Trade Gmbh*

##### **Elliott F. Kulick**

*Chairman, Pegasus International, U.S.*

##### **Joanne Leedom-Ackerman**

*Novelist and journalist, U.S.*

##### **Todung Mulya Lubis**

*Human rights lawyer and author, Indonesia*

##### **Ayo Obe**

*Chair of Steering Committee of World Movement for Democracy, Nigeria*

##### **Christine Ockrent**

*Journalist and author, France*

**Friedbert Pflüger**

*Foreign Policy Spokesman of the CDU/CSU Parliamentary Group in the German Bundestag*

**Victor M. Pinchuk**

*Member of Parliament, Ukraine; founder of Interpipe Scientific and Industrial Production Group*

**Surin Pitsuwan**

*Former Minister of Foreign Affairs, Thailand*

**Itamar Rabinovich**

*President of Tel Aviv University; former Israeli Ambassador to the U.S. and Chief Negotiator with Syria*

**Fidel V. Ramos**

*Former President of the Philippines*

**Lord Robertson of Port Ellen**

*Former Secretary General of NATO; former Defence Secretary, UK*

**Mohamed Sahnoun**

*Special Adviser to the United Nations Secretary-General on Africa*

**Ghassan Salamé**

*Former Minister Lebanon, Professor of International Relations, Paris*

**Salim A. Salim**

*Former Prime Minister of Tanzania; former Secretary General of the Organisation of African Unity*

**Douglas Schoen**

*Founding Partner of Penn, Schoen & Berland Associates, U.S.*

**Pär Stenbäck**

*Former Minister of Foreign Affairs, Finland*

**Thorvald Stoltenberg**

*Former Minister of Foreign Affairs, Norway*

**Grigory Yavlinsky**

*Chairman of Yabloko Party and its Duma faction, Russia*

**Uta Zapf**

*Chairperson of the German Bundestag Subcommittee on Disarmament, Arms Control and Non-proliferation*

**Ernesto Zedillo**

*Former President of Mexico; Director, Yale Center for the Study of Globalization*

---

**INTERNATIONAL ADVISORY BOARD**

*Crisis Group's International Advisory Board comprises major individual and corporate donors who contribute their advice and experience to Crisis Group on a regular basis.*

**Rita E. Hauser (Chair)**

**Marc Abramowitz**

**Anglo American PLC**

**APCO Worldwide Inc.**

**John Chapman Chester**

**Peter Corcoran**

**Credit Suisse Group**

**John Ehara**

**Equinox Management Partners**

**Thomas Harley**

**JP Morgan Global Foreign Exchange and Commodities**

**George Kellner**

**George Loening**

**Douglas Makepeace**

**Anna Luisa Ponti**

**Quantm**

**Michael L. Riordan**

**Sarlo Foundation of the Jewish Community Endowment Fund**

**Baron Ullens**

**Stanley Weiss**

**Westfield Group**

**Yasuyo Yamazaki**

**Sunny Yoon**

---

**SENIOR ADVISERS**

*Crisis Group's Senior Advisers are former Board Members (not presently holding executive office) who maintain an association with Crisis Group, and whose advice and support are called on from time to time.*

Oscar Arias

Zainab Bangura

Christoph Bertram

Jorge Castañeda

Eugene Chien

Gianfranco Dell'Alba

Alain Destexhe

Marika Fahlen

Stanley Fischer

Malcolm Fraser

Max Jakobson

Mong Joon Chung

Allan J. MacEachen

Barbara McDougall

Matt McHugh

George J. Mitchell

Cyril Ramaphosa

Michel Rocard

Volker Ruehe

Simone Veil

Michael Sohlman

Leo Tindemans

Ed van Thijn

Shirley Williams

**As at October 2005**